

**OPTIMALISASI RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) DR. KRT.  
RADJIMAN WEDIODININGRAT OLEH KPU KABUPATEN  
NGAWI SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) dalam Bidang  
Ilmu Politik



Oleh:

**IIS NURYANDANI**

**NIM. I71219046**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
2023**

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrohmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Iis Nuryandani

Nim : 171219046

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul: **Optimalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat Oleh KPU Kabupaten Ngawi Sebagai Sarana Pendidikan Politik**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 1 Juli 2023

Yang menyatakan



Iis Nuryandani  
NIM: 171219046

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan terhadap skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Iis Nuryandani

Nim : I71219046

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : **“Optimalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat Oleh KPU Kabupaten Ngawi Sebagai Sarana Pendidikan Politik”** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 28 Juni 2023

Pembimbing



**Aieng Widya Prakasita, M.A.**

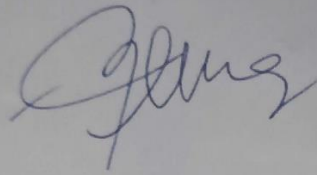
**NIP. 199502232020122025**

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh Iis Nuryandani dengan judul: "Optimalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat Oleh KPU Kabupaten Ngawi Sebagai Sarana Pendidikan Politik" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 4 Juli 2023.

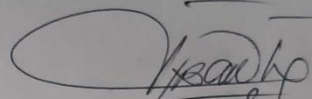
**TIM PENGUJI SKRIPSI**

Penguji I



Ajeng Widya Prakasita, M.A.  
NIP. 199502232020122025

Penguji II



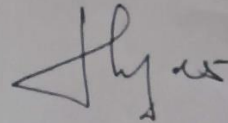
Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, M.Si.  
NIP. 197803152003121004

Penguji III



Holilah, S.Ag., M.Si  
NIP. 197610182008012008

Penguji IV



Moh. Ilyas Rolis, M.Si  
NIP. 197704182011011007

Surabaya, 4 Juli 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dekan



Moh. Chalik, M.Ag.  
NIP. 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972  
Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,  
saya:

Nama : IIS NURYANDANI

NIM : I71219046

Fakultas/Jurusan : Fisip/Ilmu Politik

E-mail address : iisnuryandani797@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan  
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain)

yang berjudul :

**Optimalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat Oleh**

**KPU Kabupaten Ngawi Sebagai Sarana Pendidikan Politik**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini  
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan  
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai  
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN  
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Oktober 2023

Penulis

( IIS NURYANDANI )

*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

**Iis Nuryandani, 2023.** Optimalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat Oleh KPU Kabupaten Ngawi Sebagai Sarana Pendidikan Politik, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

**Kata Kunci:** Komisi Pemilihan Umum, Rumah Pintar Pemilu, Pendidikan Politik

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah menganalisis usaha KPU Kabupaten Ngawi dalam memberdayakan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik serta strategi KPU Kabupaten Ngawi dalam memaksimalkan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik. Menurut UU Republik Indonesia no. 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berwenang serta berkewajiban membuat Rumah Pintar Pemilu dengan tujuan untuk mensosialisasikan serta mendidik masyarakat mengenai pemilihan umum. Dalam mewujudkan UU tersebut KPU Kabupaten Ngawi akhirnya launching Rumah Pintar Pemilu (RPP) Pada tanggal 12 April 2017, tetapi sangat disayangkan Rumah Pintar Pemilu tersebut jarang dikunjungi oleh masyarakat.

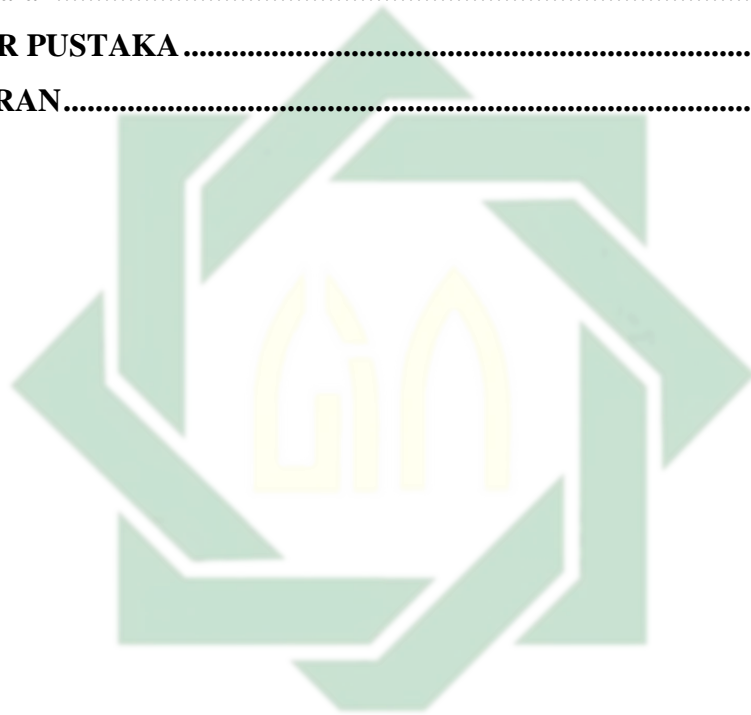
Metode yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pendidikan politik oleh Brownhill dan Smart, dimana Rumah Pintar Pemilu yang dikelola oleh KPU Kabupaten Ngawi dapat dikatakan sebagai realisasi dari pendidikan politik apabila telah memberikan kurikulum yang mencakup tiga komponen yaitu pengetahuan, keterampilan, serta nilai procedural.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah usaha KPU dalam memberdayakan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik adalah dengan jemput bola yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat serta membawa materi daripada Rumah Pintar Pemilu keluar. Strategi yang digunakan oleh KPU dalam memaksimalkan Rumah Pintar Pemilu yaitu dengan sosialisasi, mengaktifkan semua sosmed yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Ngawi, dan melakukan kerja sama dengan beberapa sekolah. Dalam memberdayakan Rumah Pintar Pemilu tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Ngawi diantaranya: fasilitas, anggaran, dan sumber daya manusia.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Konseptual.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Literatur Review.....	14
B. Kerangka Teoritik .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
C. Informan Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Tahap-Tahap Penelitian .....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	42
H. Uji Keabsahan Data.....	44
I. Sistematika Pembahasan .....	45
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>46</b>
A. Profil Rumah Pintar Pemilu & KPU Kabupaten Ngawi .....	47
1. Rumah Pintar Pemilu Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat .....	47
2. KPU Kabupaten Ngawi.....	58
B. Usaha KPU Kabupaten Ngawi dalam Memberdayakan RPP .....	62

C. Strategi KPU Kabupaten Ngawi dalam Memaksimalkan RPP.....	76
D. Kendala KPU Kabupaten Ngawi dalam Memberdayakan RPP.....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR TABEL

Table 2.1 Persamaan & Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	20
Table 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	37



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan-Tahapan Pendidikan Politik .....	30
Gambar 4.1 RPP Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat.....	49
Gambar 4.2 Ruang Pameran/Ruang Display.....	50
Gambar 4.3 Maket.....	51
Gambar 4.4 Ruang Simulasi .....	54
Gambar 4.5 Surat Suara Pemilu dan Pilkada Mulai 2004-2019 .....	56
Gambar 4.6 Ruang Audio Visual .....	56
Gambar 4.7 Flyer .....	71
Gambar 4.8 Sosialisasi pada Siswa SMK Trisakti Ngawi .....	78
Gambar 4.9 Instagram KPU Kabupaten Ngawi.....	81
Gambar 4.10 Youtube KPU Kabupaten Ngawi .....	82
Gambar 4.11 Tiktok KPU Kabupaten Ngawi .....	83
Gambar 4.12 Website KPU Kabupaten Ngawi.....	84
Gambar 4.13 Facebook KPU Kabupaten Ngawi .....	85
Gambar 4.14 Twitter KPU Kabupaten Ngawi .....	86
Gambar 4.15 KPU Ngawi Ajak Pelajar Kunjungi RPP .....	87

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada penelitian ini dibahas tentang KPU Kabupaten Ngawi dalam mengoptimalkan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Dr. Krt. Radjiman Wediodinigrat dalam melaksanakan program pendidikan politik. Menurut UU Republik Indonesia no. 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU berwenang serta berkewajiban membuat Rumah Pintar Pemilu dengan tujuan untuk mensosialisasikan serta mendidik masyarakat mengenai pemilu. KPU ialah sebuah lembaga penyelenggara pemilu serta bertugas dalam peningkatan edukasi politik pada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat mampu berperan serta dengan maksimum dalam perpolitikan. Hal tersebut menuntut KPU untuk dapat berinovasi supaya dapat menarik perhatian masyarakat seperti halnya memaksimaalkan RPP.<sup>1</sup>

Pembangunan RPP ialah sebuah bentuk dari pelayanan pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam mensosialisasikan serta memberikan pendidikan mengenai pemilihan umum.<sup>2</sup> Tujuan daripada RPP sendiri ialah untuk

---

<sup>1</sup> Dewi Kartika Maharani, "Efektivitas Kinerja Program Rpp (Rumah Pintar Pemilu) Dalam Membangun Tingkat Pendidikan Politik Masyarakat Pada Pilkada 2020 Kota Makassar," *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.

<sup>2</sup> Milan Alfianni Zega et al., "Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan," *Perspektif* 7, no. 2 (2019): 60.

mengembangkan edukasi politik di masyarakat serta menjadikan masyarakat sadar bahwasanya edukasi politik masyarakat sejak dini itu perlu diberikan supaya masyarakat yang berkedaulatan serta berdemokrasi tidak akan buta mengenai perpolitikan.<sup>3</sup>

Peneliti ingin mengetahui bagaimana usaha dari KPU Kabupaten Ngawi dalam memberdayakan RPP tersebut sebagai sarana pendidikan politik. Menariknya penelitian ini untuk dikaji ialah karena beberapa penelitian sebelumnya dilakukan di KPU dengan lokasi di perkotaan atau daerah-daerah besar sedangkan penelitian ini akan dilakukan pada KPU yang berada di daerah yang kecil. Penelitian ini juga menarik untuk dikaji dikarenakan sepiunya pengunjung pada Rumah Pintar Pemilu (RPP) di Kabupaten tersebut, sehingga menarik peneliti untuk melakukan penelitian ini dan melihat bagaimana KPU tersebut melakukan tugasnya dalam memberdayakan RPP tersebut.

RPP ialah suatu program bentukan KPU RI dari tahun 2015 yang kemudian perlu untuk merespon keinginan masyarakat sebagai pemilih serta masyarakat umum, untuk memenuhi pengetahuan mengenai demokrasi dan khususnya tentang kepemiluan. Dibentuknya RPP dirancang oleh KPU RI dengan bercermin pada tingkat partisipasi pemilih yang masih rendah mulai dari kuantitas ataupun kualitasnya pada semua metode penyelenggaraan

---

<sup>3</sup> Maharani, "Efektivitas Kinerja Program Rpp (Rumah Pintar Pemilu) Dalam Membangun Tingkat Pendidikan Politik Masyarakat Pada Pilkada 2020 Kota Makassar."

pemilihan umum juga masih belum sistematisnya pengetahuan mengenai kepemiluan pada suatu ruang.

KPU pusat telah memberikan arahan untuk membentuk RPP sebagai alternatif untuk meningkatkan partisipasi pemilih.<sup>4</sup> Pembangunan Rumah Pintar Pemilu ini sangat diperlukan agar bisa menjadi induk informasi mengenai kepemiluan, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilihan umum dan menumbuhkan kesadaran mengenai nilai-nilai melakukan pemilihan yang demokrasi. Selain itu, RPP juga diperlukan agar dapat membagikan pendidikan pemilih kepada masyarakat dengan maksimal. RPP didirikan oleh KPU RI semenjak tahun 2016, selanjutnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sampai 17 Mei 2017 RPP sudah berdiri pada 34 Provinsi dan 301 Kabupaten/Kota, kemudian KPU RI mematok sampai tahun 2019, RPP telah dibentuk di seluruh Indonesia.<sup>5</sup>

RPP yang didirikan di berbagai Kabupaten dan Kota di semua provinsi di Indonesia membuat pendidikan pada para pemilih berproses dengan terstruktur. RPP ialah sebuah fasilitas yang digunakan oleh KPU dalam mensosialisasikan edukasi pemilih. Konsep Rumah Pintar Pemilu ialah

---

<sup>4</sup> Hermansyah Lubis, "Efektivitas Sosialisasi Pilkada Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kpud Kota Medan," 2018.

<sup>5</sup> Henry Wahyono & Laila Kholid Alfirdaus, "Rumah Pintar Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Sebagai Pusat Pembelajaran Pemilih," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 3 (2021): 1170–75,

memanfaatkan bangunan yang berada di kantor KPU.<sup>6</sup> Edukasi kepada masyarakat adalah suatu target yang harus diwujudkan secara kesinambungan yang merupakan usaha KPU guna mewujudkan pemilih yang pandai dalam memilih dan demokratis. Pengelolaan RPP harus dirancang secara optimal untuk mewujudkan target tersebut. KPU dituntut untuk berkreasi dalam mengembangkan aktifitas didalamnya. RPP memiliki empat ruangan yang dimanfaatkan untuk sarana edukasi politik, yakni ruang audio visual, ruang pameran, ruang simulasi, serta ruang diskusi. Ruangan-ruangan itu dibentuk sebagai tempat guna memberikan edukasi politik.<sup>7</sup>

Pendidikan politik menjadi sesuatu yang mesti dibetulkan dan ditingkatkan dalam pencapaian sasaran kontribusi masyarakat dalam penggunaan hak pilihnya, yang kemudian dapat mewujudkan demokrasi yang berhasil.<sup>8</sup> Pendidikan politik berupaya dalam peningkatan pengetahuan politik warga Negara supaya mereka bisa berkontribusi dengan baik pada sistem politik. Edukasi politik diperuntukkan bagi warga negara untuk menambah wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang melibatkan seluruh warga negara dan warga masyarakat, maka pendidikan politik bisa dikatakan sebagai usaha guna menambah edukasi, kepahaman, dan kesadaran politik warga Negara

---

<sup>6</sup> Anugrah P. Telaumbanua Dkk, "Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak," *Perspektif* 10, no. 2 (2021): 627–43.

<sup>7</sup> Luthfia Sari and Al Rafni, "Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Pemilih," *Journal of Civic Education* 3, no. 1 (2020): 119–26.

<sup>8</sup> Mutia Eka Masputri, Al Rafni, and Susi Fitria Dewi, "Upaya Kpu Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik," *Journal of Civic Education* 2, no. 1 (2019): 67–75.

dengan harapan agar menjadi partisipan yang aktif pada sebuah proses politik. Gambaran daripada warga Negara yang sudah memiliki literacy politik yang sudah baik guna pembangunan budaya yang partisipan dapat dilihat dari aktivitas politik tersebut. Pendidikan politik bukan semata-mata ditujukan agar warga Negara melek politik dengan memahami konsep-konsep serta teori politik, karena yang dituju oleh pendidikan politik bukan untuk mencetak para ahli ilmu politik melainkan membimbing warga Negara sadar serta peduli pada peristiwa politik yang ada baik dalam konteks masyarakat maupun Negara, direalisasikan melalui partisipasinya dalam sebuah proses politik.<sup>9</sup>

Badan penyelenggara pemilu yang memiliki peran khusus dalam pemilu harus lebih dimaksimalkan dalam perwujudan literacy politik yang bagus serta tingkat partisipasi politik dengan capaian tinggi. Warga Negara yang rela, independen, rasional, dan pintar dalam memilih bukan merupakan sesuatu yang mudah dalam mendapatkannya, dengan begitu warga Negara perlu diberikan edukasi yang bisa menumbuhkan kesadaran politiknya. Disinilah KPU memiliki peranan yang penting dalam menyelenggarakan pendidikan pemilih, dikarenakan dalam edukasi pemilih terdapat informasi mengenai kepemiluan, pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu dan demokrasi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hariyanti, "Pendidikan Pemilih Sebagai Sumber Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Peserta Didik," 2017.

<sup>10</sup> Masputri, Rafni, and Dewi, "Upaya Kpu Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik."

Pada 12 April 2017, KPU Kabupaten Ngawi meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) di Jalan Untung Suropati, Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Ngawi, Wakil Presiden KPU Jawa Timur, Unsur Forpimda, Direktur OPD Kabupaten Ngawi, Presiden Parpol, Ketua Ormas, Cendekiawan dan Presiden KPU Kota Madiun, serta Presiden KPU Kabupaten Magetan. Dan Presiden KPU Ponorogo Dasar kerja yang tertulis pada pembukaan RPP adalah Surat Edaran Nomor 220/KPU/IV/2016 tentang Pembinaan Pendidikan Pemilih dan Surat Edaran Nomor 339/KPU/IV/2016 tentang pengendalian program pembentukan Rumah Pintar Pemilu.<sup>11</sup> Peraturan pelaksanaan RPP dilakukan berdasarkan SE. Jika peran RPP sebagai sumber pembelajaran tentang pemilu dan demokrasi begitu penting, sudah selayaknya dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Namun kenyataannya layanan RPP baik Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota masih belum dimanfaatkan baik oleh masyarakat secara optimal.<sup>12</sup> Masyarakat yang mengunjungi Rumah Pintar Pemilu di Kabupaten Ngawi masih sangat minim. Penelitian ini menjadi penting untuk melihat bagaimana kinerja KPU Kabupaten Ngawi dalam mengoptimalkan Rumah Pintar Pemilu yang terletak di dalam gedung KPU sebagai sarana efektif dalam menyalurkan pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan melaksanakan pendidikan politik, KPU

---

<sup>11</sup> <https://kominfo.ngawikab.go.id/kpu-ngawi-launching-rumah-pintar-pemilu-sebagai-sumber-infomasi-dan-pendidikan/>, diakses pada 11 Mei 2023

<sup>12</sup> Al rafni Suryanef, "Pkm Pengembangan Layanan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Pada Kpu Kota Bukittinggi," *Jurnal JP-Ipteks*, no. 3 (2019): 23–29.



Kabupaten Ngawi dapat memberikan informasi yang relevan dan objektif kepada masyarakat, sehingga mereka menjadi lebih cerdas dalam memilih calon-calon yang akan mewakili mereka di dalam pemilu.

Selain itu, KPU Kabupaten Ngawi juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Ngawi. Dalam upaya ini, KPU Kabupaten Ngawi perlu terus berinovasi dan menciptakan metode yang kreatif dan interaktif untuk menjadikan pendidikan politik lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Penghargaan terbaik 2 Sosialisasi pendidikan pemilih paling inovatif di Jawa Timur pada 2020 yang diterima oleh KPU Kabupaten Ngawi menjadi bukti pengakuan atas upaya mereka dalam meningkatkan pemahaman politik dan partisipasi pemilih di daerah tersebut. Dengan adanya Rumah Pintar Pemilu, KPU Kabupaten Ngawi telah memberikan fasilitas yang nyaman dan modern bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai pemilu dan politik secara keseluruhan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi KPU Kabupaten Ngawi untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam menyediakan pendidikan politik yang berkualitas serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan dari penjelasan dan permasalahan diatas maka di dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi dalam memberdayakan RPP Dr. Krt. Radjiman

Wediodiningrat sebagai sarana pendidikan pemilih serta pada penelitian ini akan menganalisis mengenai upaya yang akan digunakan oleh KPU Kabupaten Ngawi untuk memaksimalkan RPP Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat dalam pendidikan pemilih.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :  
Bagaimana usaha KPU Kabupaten Ngawi dalam mengoptimalkan RPP sebagai sarana pendidikan politik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

Untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi dalam mengoptimalkan RPP Dr. Radjiman Wediodiningrat sebagai sarana pendidikan politik

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritis**

Melihat usaha serta kendala yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi dalam mengoptimalkan RPP sebagai sarana pendidikan politik

#### **2. Manfaat praktis**

##### **a. Bagi Instansi**

Menjadi bakal pertimbangan untuk KPU memberdayakan RPP sebagai sarana pendidikan politik

##### **b. Bagi mahasiswa**

Bisa meningkatkan pengetahuan tentang peran serta KPU dalam optimalisasi RPP Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat dan bisa menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

## E. Definisi Konseptual

### 1. KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah badan Indonesia yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pemilihan legislatif, presiden, dan daerah.

KPU, bukan lembaga lain, bertanggung jawab atas semua aspek penyelenggaraan pemilu. Pasal 22(5) UUD 1945 mengatur KPU sebagai badan negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang menyelenggarakan pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri menyelenggarakan pemilihan umum.<sup>13</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdiri secara hierarki, yaitu sebagai lembaga penyelenggara tingkat nasional, KPU Provinsi penyelenggara tingkat provinsi serta KPU Kabupaten/Kota penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota.<sup>14</sup> KPU secara yuridis memiliki tanggung jawab menyelenggarakan tahapan pesta demokrasi bernama pemilu. Kunci utama

---

<sup>13</sup> Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 02 (2019): 2–9.

<sup>14</sup> Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiwati Rahmatunnisa, and Ari Ganjar Herdiansah, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019," *Politea : Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (2020): 251–72.

dalam keberhasilan pelaksanaan pemilu terletak di tangan KPU.<sup>15</sup> KPU merupakan suatu lembaga penyelenggara pemilu yang sudah ada jaminannya serta dilindungi oleh UUD 1945, oleh karena itu termasuk dalam kategori lembaga negara yang disebut kepentingan konstitusional. Sebagai lembaga penting, ditegaskan bahwa KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta memiliki tingkatan kelembagaan yang sama dengan lembaga negara lain yang dibentuk dengan undang-undang.<sup>16</sup>

Tugas KPU sekarang ialah mencari cara untuk menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat, serta mendorong kesadaran politik dari masyarakat. Oleh karenanya perlu adanya suatu proses sosialisasi yang intens kepada masyarakat mengenai perlunya pemilu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>17</sup>

## **2. Rumah Pintar Pemilu (RPP)**

Rumah Pintar Pemilu (RPP) ialah sebuah konsepsi pendidikan pemilih yang dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang pada sebuah gedung terpilih guna melaksanakan semua agenda pembelajaran pada masyarakat. Objek dari RPP sendiri ialah masyarakat umum serta semua bagian yang ada di dalam masyarakat. Seperti yang ada di buku panduan RPP (KPU,

---

<sup>15</sup> Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas."

<sup>16</sup> Suparman Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 393–412.

<sup>17</sup> Yusa Djuyandi, "Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum," *Humaniora* 5, no. 2 (2014): 1202, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3263>.

2015), Rumah Pintar Pemilu menjadi wadah untuk melakukan agenda edukasi pemilih serta tempat untuk khalayak yang menggiati pemilu dalam menciptakan sebuah kegiatan. Secara umum berdirinya RPP ini memiliki tujuan guna menambah partisipasi masyarakat, sedangkan tujuan dibentuknya Rumah Pintar Pemilu secara khusus ialah guna mengedukasi masyarakat tentang perlunya pemilu dan demokrasi.<sup>18</sup>

Berbagai sarana ada di RPP ini guna membagikan memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran hingga menjadi aspirasi bagi masyarakat mengenai perlunya pemilu dan demokrasi. Penyampaiannya sendiri bisa berupa pemutaran video visual, ruang pameran, ruang simulasi, serta ruang diskusi. Sejak berdirinya Rumah Pintar Pemilu ini di tahun 2015 hingga saat ini, tidak sedikit Rumah Pintar Pemilu yang masih sepi pengunjung. Masyarakat individu sendiri dengan niat untuk datang ke Rumah Pintar Pemilu ini sangat minim. Rumah Pintar Pemilu (RPP) ialah suatu agenda yang sudah diabsahkan oleh Bappenas. Adanya Rumah Pintar Pemilu ini bertujuan untuk menciptakan pemilih yang melek politik, yang berarti pemilih tidak lagi buta akan politik.<sup>19</sup> Secara teknis sebenarnya pembentukan RPP ini mengeluarkan biaya yang banyak serta bersifat intensif dari pusat dan kemudian berkembang makin besar di tiap-tiap

---

<sup>18</sup> Tiowinanda and nora eka putro, "Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Padang Dalam Pilkada Kota Padang" 2 (2019): 1–8.

<sup>19</sup> Mutia Eka Masputri, Al Rafni, and Susi Fitria Dewi, "Upaya Kpu Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik," *Journal of Civic Education* 2, no. 1 (2019): 67–75,

Kabupaten/kota. Adanya RPP ini dirasa perlu dan mesti didistribusikan dengan representative dan layak bagi public.<sup>20</sup>

### 3. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah upaya kolaboratif untuk mereformasi kehidupan politik sehari-hari untuk menciptakan masyarakat sejahtera yang dapat diterima secara formal dan informal.

Pendidikan politik adalah upaya satu atau lebih individu yang secara sadar melakukan transmisi budaya politik nasional dengan berpedoman pada nilai-nilai pancasila. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan politik merupakan upaya untuk membentuk proses pendidikan politik di masyarakat dalam tatanan sistem politik yang ideal.

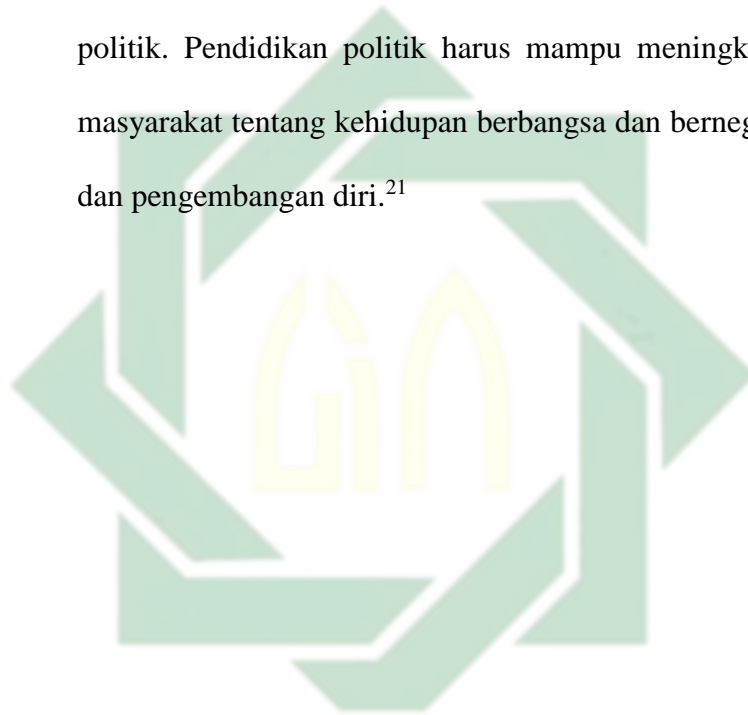
Tujuan pendidikan politik, menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Meningkatkan partisipasi politik dan pengaruh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
3. Meningkatkan kemandirian dan kedewasaan, membangun karakter bangsa, dan mendukung persatuan dan kesatuan nasional.

---

<sup>20</sup> Henry Wahyono & Laila Kholid Alfirdaus, "Rumah Pintar Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Sebagai Pusat Pembelajaran Pemilih."

Menurut pendapat ini, pendidikan politik dapat dibentuk oleh orang yang kompeten secara politik, yaitu mereka yang tahu bagaimana mengelola negara, membuat keputusan, dan memahami keterampilan politik. Pendidikan politik harus mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, bakat bangsa, dan pengembangan diri.<sup>21</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>21</sup> Payerli Pasaribu, "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 5, no. 1 (2017): 51.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Literatur Review

Studi mengenai usaha KPU dalam memberdayakan RPP sebagai sarana pendidikan politik telah banyak dilaksanakan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh *Mutua Eka Masputri, Al Rafni & Susi Fitria Dewi* yang berjudul “*Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik*” 2019 yang menjelaskan cara KPU menggunakan RPP untuk mengajarkan politik. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dan deskriptif. Metode purposive random sampling digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa upaya KPU Kota Solok untuk memperkuat RPP sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan dengan cara dating melalui website resmi KPU Kota Solok, kemudian mengunjungi berbagai sekolah dan bekerjasama dengan fakultas hukum. Universitas Muhammad Yamin Solok dan mensosialisasikannya ke berbagai tokoh masyarakat.<sup>22</sup> Penelitian ini dilakukan di KPU perkotaan dimana kota tersebut merupakan kota metropolitan.

---

<sup>22</sup> Masputri, Rafni, and Dewi, “Upaya Kpu Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik.”



Penelitian kedua dilakukan oleh *Maharani Syahfitri & Al Rafni* yang berjudul “*Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula (Studi di KPU Kota Padang)*”, 2021 yang menjelaskan RPP sebagai alat untuk mengajarkan politik kepada pemilih baru. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, informan penelitian ini diidentifikasi melalui metode purposive sampling. Studi ini menunjukkan bahwa KPU Kota Padang telah melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan RPP sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan. Mereka melakukannya melalui layanan kunjungan pribadi, KPU Goes to School, dan komunitas KPU Goes to Campus.<sup>23</sup> Penelitian ini dilakukan di KPU Kota Padang yang mana kota tersebut adalah daerah metropolitan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh *Anugrah P. Telaumbanua*, dkk dengan judul “*Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Serentak*” 2021 yang menganalisis mengenai peranan KPU Kota Binjai dalam melaksanakan RPP untuk melaksanakan pendidikan pemilih pada masyarakat. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa KPU Kota Binjai telah melakukan perannya serta fasilitator pendidikan bagi masyarakat atau pemilih pada Pemilu tahun 2019. Selain itu KPU Kota Binjai juga memiliki

---

<sup>23</sup> Maharani Syahfitri and Rafni, “*Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula (Studi Di KPU Kota Padang)*,” *Journal of Civic Education* Vol.4, no. 4 (2021): 2021, <http://jce.pjj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/576>.

peran sebagai sosialisator guna menyebarkan informasi serta agenda pemilu tahun 2019.<sup>24</sup> Penelitian ini dilakukan di KPU Kota Binjai dimana wilayah ini sudah termasuk Kota Metropolitan.

Penelitian keempat oleh *Agustina Laksmi Dewi*, dengan judul *“Peranan RPP Sebagai Sarana Pendidikan Politik di KPU Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah Mursalah”*, 2021 yang menjelaskan bagaimana KPU Kabupaten Banyumas menggunakan RPP sebagai alat untuk pendidikan politik dan pemilihan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Banyumas telah melakukan berbagai kegiatan pendampingan melalui RPP, seperti mengajar, pergi ke perguruan tinggi, mengunjungi masyarakat, dan mengunjungi komunitas.<sup>25</sup>

Penelitian kelima oleh *Al Rafni & Suryanef* dengan judul *“PKM Pengembangan Layanan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Pada KPU Kota Bukittinggi”* 2019 yang berbicara tentang pengembangan layanan RPP di KPU kota Bukittinggi sebagai alat pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga strategi digunakan untuk mengembangkan layanan ini. Yang pertama adalah mengadakan focus group discussion (FGD) bersama staf dan stakeholder KPU Kota Bukittinggi untuk

---

<sup>24</sup> Dkk, “Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak.”

<sup>25</sup> Agustina Laksmi Dewi, “Peranan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dan Pemilihan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah Mursalah,” 2021.

membuat formulir pengelolaan RPP yang jelas. Kedua, memberikan pelatihan kepada relawan demokrasi untuk membantu mempromosikan RPP. Pelatihan ini mencakup informasi dasar tentang partisipasi, demokrasi, dan pemilu. Selain itu, keterampilan akademik dan pribadi. Ketiga, untuk membedakan diri dari pusat layanan RPP lainnya di kota lain, Pusat Layanan Pendidikan Politik KPU Kota Bukittinggi harus mengembangkan RPP yang berwawasan lokal.<sup>26</sup> Penelitian ini dilakukan di RPP Perkotaan yang sudah termasuk ke dalam Kota yang metropolitan.

Penelitian keenam dilakukan oleh *Nizar Nazlia, Heri Kusmanto, M. Aswin Hasibuan, & Bahrum Jamil* dengan judul “*Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas*” 2019 yang menjelaskan fungsi KPU Kota Medan dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada penyandang disabilitas di Kota Medan dan hambatan yang dihadapi KPU. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan penelitian ini, KPU Kota Medan dapat melaksanakan misinya, tetapi masih belum optimal. Untuk menyediakan pendidikan kewarganegaraan bagi penyandang disabilitas di Kota Medan, KPU Kota Medan melakukan beberapa hal, seperti mengadakan pertemuan dengan penyandang disabilitas, membuat RPP, memberikan akses ke pemungutan suara bagi penyandang disabilitas, dan meningkatkan kolaborasi dengan

---

<sup>26</sup> Suryanef, “Pkm Pengembangan Layanan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Pada Kpu Kota Bukittinggi.”

organisasi dan yayasan penyandang disabilitas di kota Medan.<sup>27</sup> Penelitian ini fokus pada pemberian pendidikan politik pada masyarakat disabilitas. Penelitian ini dilakukan di KPU Kota yang metropolitan.

Penelitian ketujuh oleh *Dewi Kartika Maharani* dengan judul “*Efektivitas Kinerja Program RPP (Rumah Pintar Pemilu) Dalam Membangun Tingkat Pendidikan Politik Masyarakat Pada Pilkada 2020 Kota Makassar*”, 2022 yang membahas mengenai keefektifan program RPP serta efektivitas RPP dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Studi ini menunjukkan bahwa program RPP masih berjalan, tetapi banyak orang masih belum memahaminya dengan baik. Ini berarti bahwa program ini tidak efektif karena belum dibuat. Orang-orang yang datang ke KPU Kota Makassar tidak dapat memanfaatkan pelatihan pilihan yang dapat mereka praktekkan secara langsung.<sup>28</sup> Penelitian ini dilakukan di KPU Kota Makassar yang mana daerah tersebut merupakan daerah perkotaan.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh *Moch Indra Kurniawan* yang berjudul “*Peran KPU Kota Surabaya Melalui RPP Bung Tomo Dalam Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat*” 2021 yang membahas

---

<sup>27</sup> Nizar Nazlia et al., “Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Medan),” *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 1, no. 1 (2019): 20–27.

<sup>28</sup> Maharani, “Efektivitas Kinerja Program Rpp (Rumah Pintar Pemilu) Dalam Membangun Tingkat Pendidikan Politik Masyarakat Pada Pilkada 2020 Kota Makassar.”

mengenai peran KPU Kota Surabaya dalam pengembangan pendidikan politik RPP Bung Tomo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah KPU Kota Surabaya berusaha meningkatkan efektifitas RPP Bung Tomo dengan selalu memberikan update pemilu dan demokrasi yang dapat dilihat pada dinding informasi RPP Bung Tomo. RPP ini dinilai langsung dari provinsi Jawa Timur karena RPP KPU Kota Surabaya berbenah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar tentang demokrasi dan pemilu di sana.<sup>29</sup> Penelitian ini dilakukan di KPU Kota Surabaya dimana masyarakat di perkotaan tentu saja sudah cerdas.

Penelitian kesembilan oleh *Waldi Jiranda, dkk yang berjudul "Peran Rumah Pintar Pemilu KPU Bombana Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Bombana"* yang menjelaskan bagaimana RPP KPU Bombana berpartisipasi dalam pemilu 2019 Kabupaten Bombana. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa KPU Bombana memainkan peran dalam pemilu di Kabupaten Bombana dengan melakukan sosialisasi politik atau pendidikan pemilih dengan mengunjungi sekolah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Bombana.<sup>30</sup> Penelitian ini berfokus pada peningkatan partisipasi politik oleh KPU melalui RPP Bombana.

---

<sup>29</sup> Moch Indra Kurniawan, "Peran KPU Kota Surabaya Melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Bung Tomo Dalam Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat", Skripsi UIN Sunan Ampel, 2021

<sup>30</sup> Waldi Jiranda, La Ode Harjudin, and La Bilu, "Peran Rumah Pintar Pemilu KPU Bombana Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kabupaten Bombana," 2019, 89–99.

Penelitian terakhir dilakukan oleh *Yohana Yulianti Simbolon* dengan judul “*Rumah Pintar Pemilu Sebagai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula*” 2019. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menghasilkan bahwa RPP KPU Kabupaten Toba Samosir tidak bergerak seperti yang direncanakan KPU dalam peningkatan partisipasi pemilih karena beberapa halangan yang dialami.<sup>31</sup> Penelitian ini dilakukan di kabupaten Toba Samosir yang berada di provinsi Sumatra Utara. Penelitian ini berfokus pada peningkatan partisipasi pemilih.

Persamaan serta perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai metode serta fokus penelitian dijelaskan pada tabel berikut:

**Table 2.1 Persamaan & Perbedaan Penelitian Terdahulu**

Keterangan Penelitian	Temuan Penelitian
Mutia Eka Masputri, Al Rafni, & Susi Fitria Dewi “Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik” 2019	Studi ini membahas upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk menggunakan Rumah Pintar Pemilu sebagai alat untuk pendidikan politik.

<sup>31</sup> Yohana Yulianti Simbolon, “*Rumah Pintar Pemilu Sebagai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula*”, *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol.4, No. 1, 2019

<p>Persamaan : Studi ini, bersama dengan penelitian lain yang dilakukan penulis, menganalisis peran KPU dalam membuat Rumah Pintar Pemilu sebagai alat untuk pendidikan politik.</p>	
<p>Perbedaan : Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Solok sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah di Kabupaten Ngawi</p>	
<p>Maharani Syahfitri &amp; Al Rafni “Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula (Studi di KPU Kota Padang)”, 2021</p>	<p>Penelitian Maharani Syahfitri dan Al Rafni membahas upaya KPU Kota Padang untuk mempromosikan RPP sebagai alat pendidikan politik bagi pemilih pemula.</p>
<p>Persamaan : Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama menganalisis Peran KPU dalam meberdayakan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik.</p>	
<p>Perbedaan : Perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya dimana subjek pada penelitian ini adalah pemilih pemula sedangkan subjek penelitian yang penulis gunakan adalah masyarakat. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penulis dengan lokasi penelitian tersebut, penelitian oleh penulis berlokasi di Kabupaten Ngawi sedangkan lokasi dari penelitian diatas adalah Kota Padang.</p>	
<p>Anugrah P. Telaumbanua, dkk “Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam</p>	<p>Studi ini melihat bagaimana KPU Kota Binjai melakukan RPP untuk</p>

Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Serentak”2021	memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat.
<p>Persamaan : Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitian yang mana sama-sama berfokus untuk menganalisis mengenai Peran KPU dalam menjalankan RPP nya sebagai sarana pendidikan politik.</p>	
<p>Perbedaan : Perbedaannya terletak pada lokasi KPU, penelitian ini mengambil KPU di perkotaan yaitu Kota Binjai sedangkan KPU yang diambil oleh penulis adalah KPU Kabupaten Ngawi</p>	
Agustina Laksmi Dewi, “Peranan RPP Sebagai Sarana Pendidikan Politik di KPU Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah Mursalah”, 2021	Studi ini menjelaskan bagaimana RPP berfungsi sebagai alat untuk mengajarkan politik dan memilih di KPU Kabupaten Banyumas.
<p>Persamaan : Penelitian yang dilakukan oleh penulis maupun penelitian yang dilakukan oleh Agustina Laksmi Dewi sama-sama membahas mengenai Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik yang ada di KPU.</p>	
<p>Perbedaan : Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada peran daripada RPP tersebut, sedangkan fokus penelitian oleh penulis adalah upaya KPU dalam memberdayakan RPP nya. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi KPU,</p>	



<p>dimana pada penelitian ini berada di KPU Kabupaten Banyumas, sedangkan lokasi KPU yang diambil oleh penulis adalah KPU di Kabupaten Ngawi.</p>	
<p>Al Rafni &amp; Suryanef “PKM Pengembangan Layanan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Pada KPU Kota Bukittinggi” 2019</p>	<p>Pada penelitian ini dijelaskan mengenai pengembangan layanan RPP sebagai sarana pendidikan politik di KPU Kota Bukittinggi. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan layanan yang dilakukan dengan menggunakan tiga hal.</p>
<p>Persamaan : Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis ialah sama-sama menggunakan objek Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik</p>	
<p>Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh penulis terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada pengembangan layanan yang ada di Rumah Pintar Pemilu, sedangkan fokus penelitian oleh penulis adalah upaya KPU dalam mengembangkan Rumah Pintar Pemilu.</p>	
<p>Nizar Nazlia, Heri Kusmanto, M. Aswin Hasibuan, &amp; Bahrum Jamil “Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas” 2019</p>	<p>Studi ini meneliti peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di Kota Medan dan hambatan atau kendala yang dihadapinya.</p>

<p>Persamaan : Baik penelitian ini maupun penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama menganalisis mengenai peran KPU dalam memberikan pendidikan politiknya.</p>	
<p>Perbedaan : Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada peran KPU dalam memberikan pendidikan politik, sedangkan fokus penelitian oleh penulis adalah usaha KPU dalam memberikan pendidikan politik melalui Rumah Pintar Pemilu. Perbedaan selanjutnya terletak pada subjek penelitian, penelitian ini menggunakan subjek penyandang disabilitas, sedangkan subjek penelitian oleh penulis adalah masyarakat umum.</p>	
<p>Dewi Kartika Maharani dengan judul “Efektivitas Kinerja Program RPP (Rumah Pintar Pemilu) Dalam Membangun Tingkat Pendidikan Politik Masyarakat Pada Pilkada 2020 Kota Makassar”, 2022</p>	<p>Fokus penelitian ini adalah bagaimana program RPP berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik.</p>
<p>Persamaan : Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh penulis sama-sama menggunakan objek Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik.</p>	
<p>Perbedaan : Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, fokus penelitian oleh penelitian adalah melihat upaya KPU dalam pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu sedangkan fokus penelitian pada penelitian ini adalah melihat keefektivan program RPP dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.</p>	

<p>Moch Indra Kurniawan “Peran KPU Kota Surabaya Melalui RPP Bung Tomo Dalam Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat” 2021</p>	<p>Studi ini membahas peran KPU Kota Surabaya dalam mengembangkan pendidikan politik melalui RPP Bung Tomo.</p>
<p>Persamaan : Persamaan antar penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik.</p>	
<p>Perbedaan : Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis terletak pada lokasi KPU nya, dimana KPU dalam penelitian ini terletak di Perkotaan yaitu Kota Surabaya, sedangkan lokasi KPU oleh penulis adalah KPU di daerah, yaitu di Kabupaten Ngawi.</p>	
<p>Waldi Jiranda, dkk “Peran Rumah Pintar Pemilu KPU Bombana Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Bombana</p>	<p>Dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana peran RPP KPU Bombana pada pemilu 2019 di Kabupaten Bombana.</p>
<p>Persamaan : Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama menggunakan objek Rumah Pintar Pemilu yang ada di KPU Kabupaten.</p>	
<p>Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh penulis terletak pada fokus penelitiannya, dimana penelitian ini berfokus pada peran Rumah Pintar Pemilu dalam peningkatan partisipasi pemilih, sedangkan fokus penelitian oleh penulis</p>	

adalah pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu oleh KPU sebagai sarana pendidikan politik.	
Yohana Yulianti Simbolon “Rumah Pintar Pemilu Sebagai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula” 2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Toba Samosir gagal mencapai tujuan yang diharapkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala yang terjadi.
Persamaan : Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu Rumah Pintar Pemilu yang diberdayakan oleh KPU	
Perbedaan : Perbedaannya ialah fokus penelitiannya, dimana penelitian ini berfokus pada Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu, sedangkan fokus penelitian oleh penulis adalah Usaha KPU dalam memberdayakan Rumah Pintar Pemilu. Perbedaan selanjutnya terletak pada subjek penelitian, dimana subjek penelitian oleh penelitian ini adalah pemilih pemula, sedangkan subjek penelitian oleh penulis adalah masyarakat.	

Berdasarkan sepuluh literature terdahulu diatas, maka dapat dilihat bahwa penelitian tersebut dilaksanakan peneliti terdapat persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas memiliki

persamaan diantaranya sama-sama membahas mengenai Rumah Pintar Pemilu yang dikelola oleh KPU. Penelitian ini dengan penelitian diatas mayoritas sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah ada pada budaya masyarakatnya, dimana pada penelitian sebelumnya masyarakat sudah partisipatif sedangkan pada penelitian ini masyarakatnya masih menganut budaya politik apatis. Perbedaan selanjutnya ialah dimana penelitian sebelumnya mayoritas membahas mengenai Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU perkotaan dengan asumsi masyarakat perkotaan yang sudah cerdas dan tanggap dengan adanya Rumah Pintar Pemilu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini berfokus pada RPP di KPU Kabupaten yang terletak di daerah kecil dimana masyarakatnya masih belum tanggap dengan adanya Rumah Pintar Pemilu.

## **B. Kerangka Teoritik**

Menurut Robert Brownhill dan Patricia Smart, dua ahli pengarang buku tentang pendidikan politik, pendidikan politik adalah upaya untuk membuat orang berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam politik sehingga masyarakat memahami hak politik. Pernyataan tersebut bermakna bahwa, pendidikan politik memiliki pengaruh yang amat besar dalam pembentukan warga Negara yang partisipan dalam perpolitikan di Indonesia.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Almi Nurdinar et al., "Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Kepemimpinan Peserta Didik Pada Organisasi Kesiswaan Di SMA Pasundan Cikalongkulon" 10, no. 1 (2020).

Selain itu, karena pendidikan politik pada akhirnya merupakan sarana untuk mempertahankan kondisi yang relatif stabil, ada juga harapan bahwa itu akan membentuk dasar dari proses demokrasi (Brownhill dan Smart 1989:9). Dari pengertian di atas, jelas bahwa tujuan dari menerapkan pendidikan politik adalah untuk menciptakan kondisi yang stabil bagi masyarakat dan negara, sehingga proses demokrasi dapat berkembang.<sup>33</sup>

Brownhill dan Smart (1989:10) Pendidikan politik bermanfaat dalam membimbing seseorang untuk secara rasional dan akurat mengevaluasi, memahami dan mengambil keputusan tentang berbagai isu, baik kontroversial maupun partisan.<sup>34</sup> Faktor terpenting bagi efektivitas sistem politik adalah pendidikan politik.

Brownhill and Smart (1989:4) berpandangan sebagai berikut:

*“The aim of political education should therefore be to develop the professional interest and to point them toward their political responsibilities, while at the same time endeavouring to give them the necessary knowledge and skills to carry out those responsibilities”.*<sup>35</sup>

Mengutip dari Brownhill dan Smart, mereka berpendapat :

*“We shall use stradling’s proposals for such a curriculum as a checklist for deciding on priorities. He examines the contents of the political*

---

<sup>33</sup> Eko Handoyo and Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, Pertama (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2017).

<sup>34</sup> “Bab II Tinjauan Pustaka,” *Universitas Muhammadiyah*, no. 1 (2009): 10–32.

<sup>35</sup> Handoyo and Lestari, *Pendidikan Politik*.

*curriculum by dividing into three sections: knowledge, skills, and attitudes and procedural values. He further divides knowledge into propositional knowledge, and practical knowledge and understanding: skills into intellectual skills, action skills, and communication skills”.*

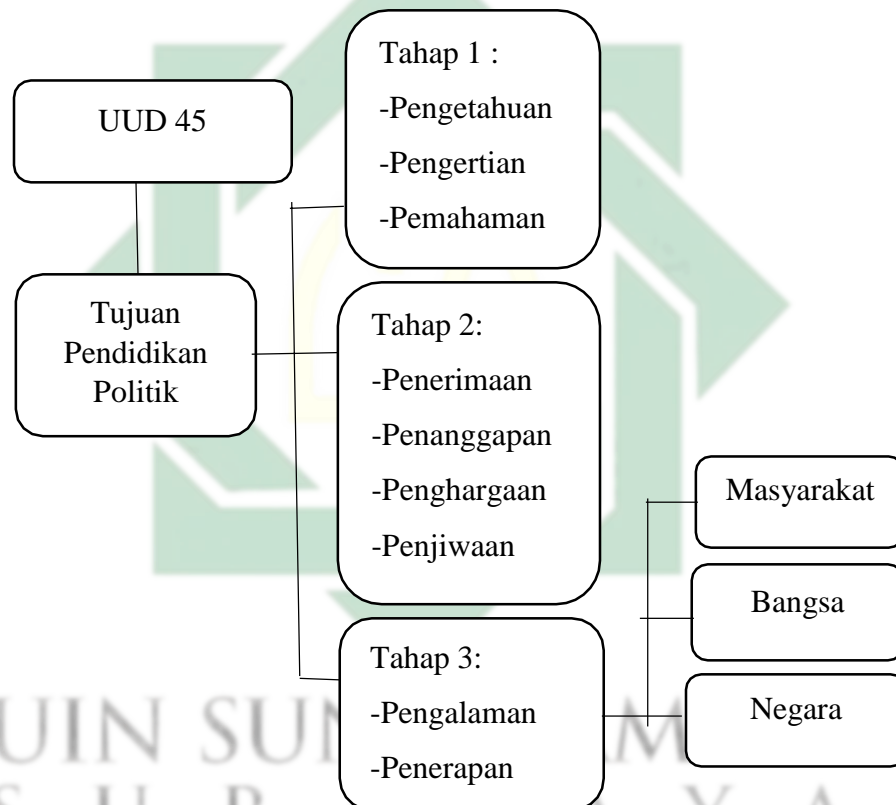
Berdasarkan komentar Brownhill dan Smart di atas, pendidikan politik harus memiliki kurikulum yang mencakup aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan nilai prosedural. Ketiga aspek tersebut harus ada dalam pelaksanaan pendidikan politik. Pengetahuan harus diberikan sebagai dasar pemahaman untuk memahaminya secara nyata. Pengetahuan ini bersifat teoretis, sedangkan keterampilan lebih bersifat terapan atau biasa disebut dengan penerapan pengetahuan tersebut. Maka nilai prosedural itu harus tetap dipertahankan untuk acuan dan sebatas mengambil tindakan politik. Dari ketiga aspek tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan politik tidak hanya menekankan pada pemahaman politik teoretis warga negara, tetapi juga harus memiliki tindakan politik nyata atau tindakan warga negara setelah memahami politik mengetahui politik ini. Hal ini memiliki dasar bahwa pendidikan politik bukan sekedar melatih orang untuk cerdas secara politik, tetapi seperti yang dikatakan Kartono, pendidikan politik lebih menekankan pada kemampuan untuk mengamati situasi secara kritis, mengkritik, menentukan sikap yang benar, melatih kecerdikan dalam operasi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Azizatul Isnaini, “Pendidikan Politik Pada Pondok Pesantren Abu Manshur Kabupaten Cirebon” 11, no. 1 (2022): 38–50.

Berikut merupakan gambaran umum tahapan-tahapan mengenai pendidikan politik yang dapat dicapai:

**Gambar 2.1 Tahapan-Tahapan Pendidikan Politik**



Sumber : (Brownhill, 1989:IV)

Tahap awal sering disebut *cognitive morality* merupakan tahap yang paling rendah atau bisa dibilang pencapaiannya mudah, memiliki pengetahuan yang kaitannya dengan kesadaran politik. Tahapan kedua atau tahap terakhir berkaitan dengan masalah sikap (afektif), yang memiliki hubungan dengan



tindakan atau masalah perilaku setelah orang tersebut mendapatkan pendidikan politik.<sup>37</sup>

Penyelenggaraan pendidikan politik harus mencakup kerangka pelaksanaan pendidikan politik, pentingnya kurikulum pendidikan politik salah satunya. Dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, materi-materi yang terkandung dalam proses pendidikan kewarganegaraan, seperti konsep-konsep politik, bentuk-bentuk pemerintahan negara dan pemerintahan daerah, yang juga mencakup masalah hukum dan ekonomi, dapat menjadi materi pendukung dalam mewujudkan warga negara yang berpendidikan politik adalah tujuan akhir dari pendidikan politik.

Brownhill dan Smart mengindikasikan bahwa kurikulum pendidikan politik harus mencakup:

- a. Basis etika harus dibangun, yang mencakup rasa hormat terhadap orang lain, toleransi, dan prinsip memperlakukan orang lain sebagaimana seseorang ingin memperlakukan dirinya sendiri.
- b. Pertimbangan tentang cara peraturan dapat diubah dan umumnya cara penyelesaian masalah
- c. Karakter aturan dan otoritas
- d. Persepsi kewajiban otoritas yang sah

---

<sup>37</sup> "Bab II Tinjauan Pustaka."

- e. Pemahaman tentang konsep politik dasar seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan, supremasi hukum, dan beberapa argumen yang terkait dengan konsep-konsep ini
- f. Pemahaman dasar struktur pemerintahan pusat dan daerah
- g. Beberapa pemahaman tentang cara ekonomi nasional
- h. Beberapa pengetahuan mengenai sejarah inggris dan internasional baru-baru ini.
- i. Analisis diri

Materi pendidikan politik dapat diberikan melalui ceramah, diskusi, simulasi, kegiatan kesenian, olahraga, visualisasi, keteladanan, pelatihan dan organisasi, serta pelatihan langsung seperti kegiatan amal.<sup>38</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>38</sup> Idrus Affandi Imam Alfikri Paratama, "Peran Pendidikan Politik Pada Organisasi Mahasiswa KAMMI Dan IMM Di Kota Pangkalpinang Dalam Pembentukan Budaya Politik Pancasila," n.d.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah kegiatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan terencana, mengurutkannya sesuai dengan tingkatan tertentu, yang kemudian mendeskripsikan dan menginterpretasikan data tersebut yang didapatkan baik dengan wawancara, observasi, hingga dokumentasi. (Rahardjo, 2012). Data tersebut bisa saja berupa gambar, kata, foto, catatan-catatan, dan lain-lain. Penelitian kualitatif menunjukkan kebenaran datanya dan dapat diterima oleh peneliti.<sup>39</sup>

Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari dan memahami pentingnya masalah sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif mencakup beberapa proyek penting, seperti mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan informasi dari informan, menguraikan data khusus dari informan, mengurangi, dan memverifikasi makna dari masalah yang diteliti.

---

<sup>39</sup> M. Ag. Dr. H. Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, *Japanese Journal of Physical Fitness and Sports Medicine*, vol. 17, 2015.

Perspektif penelitian kualitatif ini adalah gaya induktif yang berfokus pada pemaknaan individu dan berurusan dengan kompleksitas masalah (Creswell, 2010:5). Proposal dan laporan penelitian kualitatif ini cenderung fleksibel, dan terbuka daripada terstruktur secara kaku.<sup>40</sup>

Atas dasar pandangan diatas, maka metode kualitatif akan mendeskripsikan secara langsung antara peneliti dengan informan, objek serta subjek penelitian. Pada penelitian ini penulis akan mencoba menganalisis serta menyajikan mengenai bagaimana KPU Kabupaten Ngawi memberdayakan RPP Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat sebagai sarana pendidikan politik sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan.

## 2. Jenis Penelitian

Deskriptif kualitatif, yaitu sebuah teknik yang memaparkan serta menafsirkan arti berbagai data yang sudah dikumpulkan dengan mencermati serta mencatat sebanyak-banyaknya aspek konteks yang diteliti pada waktu itu, yang akhirnya mendapatkan gambaran secara umum serta menyeluruh mengenai situasi yang sebenarnya (Kriyantono, 2007).<sup>41</sup> Penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif berarti peneliti mengkaji data yang telah terkumpul bisa berupa kalimat-kalimat maupun

---

<sup>40</sup> M.Hum. Dr. Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, vol. 1, 2008,

<sup>41</sup> Khabib Alia Akhmad, "Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Distro Di Kota Surakarta)," *DutaCom Journal* 9, no. 1 (2015): 43–54,

gambar dan bukan berupa angka (Moleong, 2010). Naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memorandum, dan dokumen resmi lainnya dapat menjadi sumber data tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang berupaya untuk membongkar sebuah permasalahan dengan menggambarkan situasi subyek serta obyek penelitian pada saat itu dan berdasar pada berbagai fakta yang terjadi pada objek penelitian, yang kemudian disuguhkan dengan apa adanya (Nawawi, 2005).<sup>42</sup>

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mengidentifikasi berbagai ciri yang membedakan atau mencirikan sekelompok orang, suatu objek atau suatu peristiwa. Pada dasarnya, jenis penelitian deskriptif kualitatif ini melibatkan pembuatan proses konseptualisasi dan kerangka klasifikasi yang menunjukkan tahap awal pengembangan suatu disiplin ilmu.<sup>43</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data yang telah ditarik kesimpulan akan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Data tersebut akan di deskripsikan dengan jelas sehingga dapat menggambarkan data dengan baik.

---

<sup>42</sup> Agus Purnomo, "Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pariwisata Di Kabupaten Karanganyar (Studi Analisis Deskriptif Kualitatif Pada Akun Instagram @Explorekankaranganyar)" 2, no. 2 (2018): 35-43.

<sup>43</sup> Cut Medika Zellatifanny and Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi," *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83-90

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ngawi provinsi Jawa timur. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut diantaranya, yang pertama jarang adanya penelitian yang dilakukan di Kabupaten Ngawi dikarenakan letaknya yang terpencil yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Bahkan kerap kali kabupaten ini dianggap sebagai daerah di Jawa Tengah. Alasan kedua peneliti mengambil lokasi tersebut ialah Rumah Pintar Pemilu di lokasi tersebut berada di pedesaan dan sepi pengunjung. Selanjutnya alasan peneliti mengambil lokasi tersebut adalah jarang adanya informasi yang di update di social media mengenai proses berjalannya RPP di daerah tersebut. Terkait dengan waktu penelitian yakni 3 bulan terhitung dari bulan April hingga Juli 2023

## **C. Informan Penelitian**

Subjek penelitian merupakan seseorang yang memang ahli dengan sesuatu yang diteliti. Moleong berpendapat bahwa subjek penelitian merupakan orang yang dapat kita mintai informasi mengenai sesuatu mengenai situasi serta kondisi latar penelitian. Terdapat beberapa syarat yang harus dipraktekkan ketika memilih subjek penelitian, diantaranya: pihak yang sudah berpengalaman dalam kegiatan yang diteliti, mempunyai keterlibatan yang penuh pada aktivitas yang sedang diteliti, serta punya cukup waktu untuk dimintai informasi.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian* (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004).

Beberapa kriteria yang ditentukan dalam subjek penelitian ini ialah:

1. Ketua KPU Kabupaten Ngawi
2. Anggota KPU Kabupaten Ngawi
3. Tim pengelola dan pengendali Rumah Pintar Pemilu
4. Masyarakat pengunjung RPP
5. Organisasi masyarakat / LSM pegiat pemilu

**Table 3.1 Daftar Informan Penelitian**

No.	Nama Informan	Status Informan
1	Ibu Prima Aequina S.	Ketua KPU Kabupaten Ngawi
2	Bapak Budi Rahayu	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi
3	Ibu Eka Paramithasari	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
4	Bapak Rodin	Ketua Ormas Anshor PAC Kendal
5	Bapak Kamid	Anggota Ormas Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Kendal
6	Lina Rumiati	Mahasiswa Alumni STKIP Modern Ngawi

**D. Sumber Data**

Penelitian ini memakai sumber data yang berasal dari berbagai literature dan dilengkapi dengan beberapa data lapangan berupa data primer dan data sekunder.

## 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang perolehannya melalui pemeriksaan serta survey di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pengamatan. Peneliti akan melakukan wawancara terhadap informan mengenai upaya KPUD Kabupaten Ngawi dalam memberdayakan RPP sebagai sarana pendidikan pemilih serta strategi yang digunakan untuk memaksimalkan peran RPP dalam memberikan pendidikan politik.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menopang saat menyusun laporan tugas akhir. Data sekunder ini diperoleh tidak melalui pengamatan secara langsung di lapangan, tetapi data yang perolehannya dari pihak terkait contohnya dinas, kantor, dan lain sebagainya.<sup>45</sup> Peneliti akan mengumpulkan data-data baik berupa laporan-laporan yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Ngawi dalam memberdayakan RPP serta strategi yang digunakan untuk memaksimalkan peran RPP dalam memberikan pendidikan politik.

## E. Tahap-Tahap Penelitian

Secara garis besar penelitian ini ditempuh dengan merujuk pada pendapat Moleong (2007:126) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa

---

<sup>45</sup> Marwan Lubis, Nuril Mahda Rangkuti, and Moelky Ardan, "Evaluasi Geometrik Jalan Pada Tikungan Laowomaru," *Semnastek Uisu 2019*, 2019, 37–43,



tahapan dalam penelitian kualitatif. Tahap-tahap tersebut ialah tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, serta tahap analisis data.

#### 1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap pralapangan ini ialah tahap yang peneliti lakukan sebelum pengumpulan data. Tahap ini dilakukan dengan penentuan permasalahan atau fokus penelitian dengan pengamatan lapangan. Rincian dalam tahapan ini ialah: penyusunan rancangan lapangan, pemilihan lapangan penelitian, pengurusan perizinan, pemeriksaan lapangan, pemilihan serta pemanfaatan informasi, penyiapan perlengkapan informasi, serta persoalan etika penelitian.

#### 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan ini dilakukan yang dilakukan oleh peneliti di tempat penelitian. Data yang sesuai dengan fokus masalah serta tujuan dari penelitian dikumpulkan oleh peneliti pada tahap ini. Pengumpulan data dapat berupa observasi, wawancara, ataupun dokumentasi. Perlu alat yang harus disiapkan dalam mengumpulkan data pada tahapan ini seperti lembar wawancara, kamera, serta alat perekam suara. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada informan secara langsung. Setelah data-data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian ialah mengolah data hasil penelitian. Tahapan setelahnya ialah menyusun berbagai data serta berbagai informasi tersebut yang akhirnya disesuaikan dengan kajian penelitian ini yaitu mendeskripsikan upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Ngawi dalam

memberdayakan RPP Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat sebagai sarana pendidikan politik. Setelah berbagai data yang telah dikumpulkan dari lapangan didapatkan, lalu ditinjau memakai berbagai teori yang di sampaikan beberapa ahli pada bagian kajian teori, kemudian ditarik kesimpulan lalu di berikan rekomendasi dari pihak terkait.

### 3. Tahap Analisa Data

Pembahasan pada tahap ini ialah tentang prinsip pokok pada analisis data. Prinsip tersebut meliputi dasar, penemuan tema, serta perumusan masalah. Berbagai data yang sudah didapatkan dan terkumpul dari lapangan, diuji kredibilitasnya terlebih dahulu oleh peneliti sebelum dilakukan analisis.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah langkah penelitian yang paling penting. Kredibilitas yang berkualitas akan didapatkan dari teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan benar, begitupun sebaliknya. Prosedur dan ciri-ciri dari penelitian kualitatif harus dilaksanakan dengan cermat dan jangan sampai salah pada tahapan ini.<sup>46</sup> Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>46</sup> Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," *Repository UIN Malang*, 2011.

## 1. Wawancara

Pengumpulan sebuah informasi dengan bertanya kepada informan melalui komunikasi atau berinteraksi adalah teknik pengumpulan data dengan wawancara. Metode ini dapat dilakukan tanpa tatap muka dikarenakan perkembangan teknologi informasi saat ini seperti menggunakan media telekomunikasi. Informasi yang mendalam mengenai tema yang dibahas dalam suatu penelitian bisa didapatkan melalui teknik wawancara atau bisa dikatakan teknik ini ialah teknik pembuktian pada informasi yang telah didapatkan dari teknik sebelumnya. Peneliti mendapatkan data awal dari informan menggunakan metode wawancara ini. Pengumpulan data dengan wawancara akan lebih valid karena ber sumber dari informan sendiri, sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang diperlukan.

## 2. Dokumentasi

Informasi juga dapat diperoleh melalui fakta yang tersimpan, seperti surat, catatan harian, hasil rapat, hadiah, jurnal kegiatan, dan lain-lain. Data yang berupa dokumen biasanya dapat digunakan untuk menggali informasi pada masa lalu. Kepekaan teoritik harus dimiliki oleh peneliti dalam pemaknaan dokumen tersebut agar tidak hanya menjadi sekedar barang pajangan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi juga peneliti lakukan untuk mendapatkan data sekunder dari pihak terkait untuk memperkuat data sebelumnya.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dibuat selama dan setelah pengumpulan data. Analisis data ini sebenarnya diawali dari saat peneliti sudah mulai mengumpulkan data, dengan cara menyaring data yang sekiranya perlu serta data yang sekiranya tidak perlu. Selama pengumpulan data dalam analisis data membuat peneliti bolak-balik antara berpikir mengenai data dengan mengembangkan skema dalam pengumpulan data baru (Miles dan Huberman, 2014). Analisis data kualitatif merupakan sebuah langkah yang dijalankan dengan data, mengelola data, serta mengklasifikasikan data. Analisis data ialah suatu tindakan dalam mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, mengkode, dan mengkategorikannya, sehingga dapat memperoleh suatu hasil yang berdasarkan pada fokus masalah yang ingin dijawab. Penelitian ini menggunakan empat tahap dalam proses analisis data.<sup>47</sup> :

### 1. Pengumpulan data

Deskriptif dan reflektif adalah dua jenis informasi yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, atau wawancara.. Catatan deskriptif adalah catatan ilmiah sebagai contoh dari apa yang dilihat, didengar atau bahkan diamati oleh peneliti sendiri tanpa peneliti memberikan komentar apapun tentang fenomena yang dialami, sedangkan catatan reflektif adalah catatan yang

---

<sup>47</sup> M. Pd Sirajuddin, Saleh, S. Pd., *Analisis Data Kualitatif, Analisis Data Kualitatif*, Pertama (Pustaka Ramadhab, Bandung, 2016),

menggambarkan kesan, komentar, pendapat, dan penilaian peneliti tentang fenomena yang dialami.

## 2. Reduksi Data

Data dikumpulkan kemudian direduksi untuk mengetahui mana yang penting dan bermakna. Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah, penemuan, makna, atau jawaban atas pertanyaan penelitian. Materi disusun dengan cara yang disederhanakan dan terstruktur dan menggambarkan esensi dari pengamatan dan maknanya. Informasi yang akan direduksi hanya informasi tentang hasil dari masalah penelitian yang direduksi. Informasi yang tidak terkait dengan masalah penelitian dibuang. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menganalisis secara tajam, mengkategorikan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu, pada akhirnya mengurutkan dan memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

## 3. Penyajian Data

Bentuk penyajian data dapat berupa teks, gambar, grafik, hingga tabel. Penyajian data bertujuan untuk memadukan informasi sampai bisa menggambarkan situasi yang terjadi. Pembuatan naratif, matrik, hingga grafik dapat memudahkan untuk menguasai informasi baik secara menyeluruh maupun bagian-bagian, yang akhirnya data tersebut dapat dikuasai oleh peneliti dan tidak jatuh pada kesimpulan informasi yang membosankan. Data yang berserakan dan tidak rapi akan membuat peneliti

terpengaruh dan bertindak secara ceroboh kemudian mengambil kesimpulan yang memihak dan tidak mendasar.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dapat ditarik selama proses penelitian dengan cara yang sama seperti dalam proses reduksi data. Informasi yang dikumpulkan cukup, kemudian ditarik kesimpulan awal, kemudian kesimpulan akhir, oleh karena itu perlu dicari pola, tema, hubungan, kesamaan, masalah umum, hipotesis, dll. Kesimpulan-kesimpulan tersebut harus diklarifikasi serta diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kemudian, data yang ada digabungkan ke dalam elemen informasi, yang dapat diulas tanpa informasi tambahan dan merupakan rumusan kategori-kategori berdasarkan prinsip holistic. Ini memungkinkan pembentukan kategori baru dari data yang sudah ada.

#### **H. Uji Keabsahan Data**

Untuk menghindari kesalahan atau kesalahan data yang dikumpulkan, perlu dilakukan pengecekan kebenaran data. Konfirmasi keabsahan data didasarkan pada kriteria kredibilitas dengan menggunakan teknik triangulasi, konsistensi hasil dan peer review (Moleong, 2002). Ukuran ketelitian materi penelitian yang lebih menekankan pada informasi daripada sikap dan jumlah orang adalah keabsahan materi. Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan model triangulasi. Model triangulasi ialah mengulang atau

mengklarifikasi dengan berbagai sumber. Cara mentriangulasi sumber bisa dikerjakan dengan wawancara kepada informan satu dengan informan yang lain sebagai pembanding. Data yang diperoleh dapat dimintai pertanggung jawabannya kepada peneliti yang terlibat, apabila triangulasi pada aspek metode, perlu meninjau ulang metode yang digunakan (dokumentasi, catatan lapangan dll).<sup>48</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, hingga sistematika penelitian

### **Bab II : KAJIAN TEORI**

Bab ini berisikan uraian mengenai penelitian terdahulu serta landasan teori yang relevan yang sinkron dengan tema skripsi

### **Bab III : METODE PENELITIAN**

Ini mencakup metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis data yang dikumpulkan, jenis dan sumbernya, cara memilih informan dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan uji keabsahan data.

### **Bab IV : PEMBAHASAN**

Bab selanjutnya berisikan mengenai penyajian data yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dihasilkan dari lapangan lalu data yang ditemukan

---

<sup>48</sup> Elma Sutriani and Rika Octaviani, "Keabsahan Data (Kualitatif)," *INA-Rxiv*, 2019, 1–22.

dilapangan akan dibuat analisis menggunakan teori yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya dan kemudian di konfirmasi dalam bentuk hasil temuan penelitian

#### **Bab V : PENUTUP**

Bab terakhir ini berisikan mengenai kesimpulan serta saran peneliti dengan diikuti daftar pustaka, serta berbagai lampiran dokumentasi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Profil Rumah Pintar Pemilu & KPU Kabupaten Ngawi**

##### **1. Rumah Pintar Pemilu (RPP) Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat**

###### **a. Sejarah RPP Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat**

Rumah Pintar Pemilu merupakan salah satu inisiatif yang termasuk dalam tugas dan tanggung jawab divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, parmas, dan SDM di KPU Kabupaten Ngawi. Konsep Rumah Pintar Pemilu ini didesain sebagai sarana untuk melaksanakan pendidikan pemilih yang efektif dan interaktif. Dalam Rumah Pintar Pemilu, pemilih dapat memperoleh informasi yang lengkap dan terpercaya mengenai proses pemilu, serta hak dan kewajiban pemilih. Selain itu, Rumah Pintar Pemilu juga menyelenggarakan berbagai kegiatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Dengan demikian, Rumah Pintar Pemilu menjadi wadah yang berperan penting dalam upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih di Kabupaten Ngawi.

KPU Kabupaten Ngawi memberikan nama Rumah Pintar Pemilu dengan nama RPP “Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat” pemberian nama ini terinspirasi dari nama besar seorang pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat adalah salah satu Pahlawan Perjuangan Kemerdekaan

Indonesia sekaligus Tokoh Pergerakan Nasional yang pernah menetap Di Dusun Dirgo, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi.<sup>49</sup>

Perjuangannya dalam kemerdekaan Indonesia dimulai dari perannya menjadi salah satu pendiri Organisasi Boedi Utomo sampai menjadi ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Beliau juga menjadi saksi lahirnya ideologi Pancasila yang ditulisnya dalam pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama. Ia juga pernah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada awal kemerdekaan dan kemudian menjadi anggota Dewan Permusyawaratan Tertinggi Republik Indonesia. Semangat juang dan nilai-nilai patriotik yang dimiliki Dr. Memiliki KRT Radjiman Wedyodiningrat hendaknya menjadi panutan dan panutan bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, untuk memperkuat karakter bangsa.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> KPU Kabupaten Ngawi, "LAPORAN PENGELOLAAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2019," 2019.

<sup>50</sup> Ibid, Hal.1

Gambar 4.1 RPP Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat



Sumber : Laporan RPP Kabupaten Ngawi 2019

RPP Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat KPU Kabupaten Ngawi terdiri dari beberapa ruang diantaranya: ruang pameran (Display), ruang simulasi, ruang audio visual sekaligus ruang diskusi. Rumah Pintar Pemilu merupakan ruangan untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum dalam melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Tujuan dibangunnya RPP “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” di KPU Kabupaten Ngawi adalah sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara pemilu dalam mengedukasikan kepada masyarakat luas baik umum maupun khusus akan pentingnya demokrasi dengan cara memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi, meningkatkan pemahaman pentingnya

berdemokrasi serta menjadi wadah silaturahmi bagi komunitas peduli pemilu dan demokrasi.<sup>51</sup>

b. Materi Display/Alat Peraga

Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Ngawi menampung materi pemilu dan demokrasi seperti materi pendidikan pemilih dan museum pemilu. Dalam penyajian RPP “Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat” KPU Kabupaten Ngawi terbagi dalam 3 ruang dengan penjelasan masing – masing sebagai berikut :

1. Ruang I (Pameran)

Ruangan ini digunakan untuk menambah wawasan serta pemahaman mengenai kepemiluan, mulai dari tahapan-tahapan pemilu, pentingnya pemilu, hingga berisikan buku-buku mengenai demokrasi dan kepemiluan.

Gambar 4.2 Ruang Pameran/Ruang Display



Sumber : Laporan RPP Kabupaten Ngawi Tahun 2019

---

<sup>51</sup> Ibid, Laporan RPP Kabupaten Ngawi 2019

Dalam Ruangan tersebut terdapat beberapa pameran diantaranya:

a. Maket

Maket merupakan visualisasi 3 dimensi yang menggambarkan proses dan alur pemungutan suara di TPS.

Gambar 4.3 Maket



Sumber: KPU Kabupaten Ngawi

b. Papan Informasi Tentang Pentingnya Pemilu Dan Demokrasi

Papan informasi tentang Pentingnya Pemilu dan Demokrasi berisi tentang artikel, tulisan tentang pentingnya Pemilu dan Demokrasi. Materi ditampilkan dalam bentuk bagan dilengkapi dengan penjelasannya.

c. Papan Informasi Sejarah Pemilu

Papan informasi ini berisi sejarah penelitian pemilu, termasuk penyelenggaraan, peserta, sistem, dan hasilnya..

d. Sistem Pemilu di Dunia

Konten Sistem Pemilu mencakup penjelasan tentang sistem pemilihan (proporsional terbuka, proporsional campuran, atau distrik perwakilan).

e. Papan Informasi Struktur Organisasi

Papan Informasi ini berisi konten mengenai struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

f. Papan Informasi Tentang Presiden

Papan informasi ini berisi tentang sejarah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dari awal hingga sekarang.

g. Papan Informasi Anggota KPU RI

Papan informasi ini berisi konten Anggota KPU RI periode 2019-2024.

h. Papan Informasi Anggota KPU Provinsi Jawa Timur

Papan Informasi ini berisi konten susunan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.

i. Papan Informasi sejarah Penyelenggara Pemilu

Papan informasi ini berisi tentang sejarah penyelenggara pemilu mulai tahun 1955 sampai dengan sekarang.

j. Papan informasi tahapan penyelenggaraan Pemilu

Proses pemilihan mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, anggota Partai Demokrat, Presiden dan Wakil Presiden,

pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan walikota, dan proses lainnya. Pembentukan lembaga ad hoc, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon peserta pemilu, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih adalah bagian dari proses ini.

k. Papan Informasi Anggota KPU Kabupaten Ngawi.

Papan Informasi ini berisi konten susunan Anggota KPU kabupaten Ngawi periode 2019-2024.

l. Papan Informasi Bupati dan Wakil Bupati Ngawi.

Papan Informasi ini berisi konten Bupati dan Wakil Bupati Ngawi terpilih periode 2005-2020.

m. Papan Informasi Peserta Pemilu

Konten ini mencakup pemilihan calon baik partai politik maupun perseorangan di DPR, pemilihan anggota DPD dan DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah.

2. Ruang II (Simulasi)

Ruangan ini digunakan untuk melakukan simulasi penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam ruangan ini pengunjung akan langsung mempraktekkan bagaimana pelaksanaan pemilihan umum di TPS, sehingga ketika pelaksanaan pemungutan suara masyarakat tidak kebingungan.

Gambar 4.4 Ruang Simulasi



Sumber : Laporan RPP Kabupaten Ngawi Tahun 2019

Dalam ruang ini terdapat alat peraga suara serta papan informasi pendukung proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut<sup>52</sup> :

a. Alat Peraga TPS

Pada ruangan ini ditampilkan alat peraga dalam pemungutan suara di TPS mulai dari tata letak serta ornamen pemungutan suara. Ornamen yang dimaksud seperti kotak suara, bilik suara, alat coblos dan perlengkapan administrasi dalam menunjang kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

b. Papan Informasi Denah TPS Dan Tata cara Pemungutan Suara

---

<sup>52</sup> Ibid, Laporan RPP Kabupaten Ngawi Tahun 2019



Papan informasi ini berisi konten tentang Denah Pemungutan Suara di TPS. Jadi dengan adanya papan informasi tentang Denah TPS dan tata cara pemungutan ini pengunjung bisa langsung melakukan simulasi tentang pemungutan suara secara mandiri. Dimulai dari melihat denah TPS dan dipandu dengan tatacara pemungutan suara pengunjung dapat langsung praktek dengan bantuan alat peraga yang telah disediakan.

c. Papan Informasi Proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi

Setelah selesai melaksanakan simulasi dengan panduan denah TPD, papan informasi ini lebih menekankan terhadap bagaimana tata acara proses pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara dan proses rekapitulasi dilaksanakan.

d. Surat suara mulai Pemilu dan Pilkada 2004 – 2019

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Gambar 4.5 Surat Suara Pemilu dan Pilkada Mulai 2004-2019



Sumber: Laporan RPP Kabupaten Ngawi 2019

### 3. Ruang III (Audio Visual dan Diskusi)

Ruangan ini digunakan untuk menampilkan informasi yang memerlukan bantuan proyektor. Pada ruangan ini juga pengunjung dapat melakukan diskusi.

Gambar 4.6 Ruang Audio Visual



Sumber : Laporan RPP Kabupaten Ngawi Tahun 2019

Ruang III (Audio Visual dan Diskusi) berisi :

a. Kursi

Kursi ini berfungsi untuk melihat film-film tentang kepemiluan ataupun sejarah pemilu. Disamping itu bisa digunakan untuk melakukan diskusi terkait isu-isu kepemiluan serta rapat kecil anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Ngawi.

b. Branding Rumah Pintar Pemilu

Dengan adanya branding ini, pengunjung dapat mengabadikan momen saat berkunjung dengan berfoto bersama dan berselfie dengan backdrop RPP “Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat”.

c. Pengeras suara dan LCD Proyektor

## 2. KPU Kabupaten Ngawi

Komisi Pemilihan Umum atau biasa disingkat KPU ialah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang bersifat nasional, tetap, serta mandiri, dalam pelaksanaan pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah NKRI. KPU menjalankan tugas secara berkesinambungan dan dalam penyelenggaraan pemilu, KPU terbebas dari pengaruh pihak manapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pembentukan KPU ini agar meminimalisir adanya campur tangan dari penguasa dalam pelaksanaan pemilu.

Dalam KPU Kabupaten Ngawi, terdapat 11 anggota KPU yang sudah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka terbagi ke dalam empat

divisi yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Divisi pertama adalah divisi teknis penyelenggaraan pemilu, yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan teknis seluruh tahapan pemilu di Kabupaten Ngawi. Divisi kedua adalah divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, parmas, dan SDM, yang fokus pada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pendidikan pemilih, pengelolaan parpol dan calon anggota, serta pengembangan sumber daya manusia di KPU. Divisi ketiga adalah divisi hukum dan pengawasan, yang bertugas mengawasi dan menegakkan aturan hukum terkait pemilu, serta menangani sengketa pemilihan. Terakhir, divisi keempat adalah divisi perencanaan, data, dan informasi, yang mengelola perencanaan strategis, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyediaan informasi terkait pemilu di Kabupaten Ngawi. Dengan struktur dan tugas yang terbagi secara jelas, KPU Kabupaten Ngawi berupaya untuk melaksanakan pemilu yang adil, transparan, dan partisipatif.

Beberapa visi dan misi dari KPU diantaranya:

#### **Visi**

Untuk mewujudkan negara Indonesia yang berkualitas tinggi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu parlemen secara jujur, profesional, mandiri, transparan, dan bertanggung jawab dalam negara kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD 1945).

### **Misi**

1. Menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Kompeten, Kredibel, dan Mampu Menyelenggarakan Pemilu;
2. Melaksanakan pemilihan umum secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, terdidik, dan beradab untuk pemilihan anggota DPRD, anggota DPRD, Ketua dan Wakil Ketua, serta bupati dan wakil kepala daerah; dan
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang bersih, efisien, dan efektif.
4. Memberikan layanan yang adil dan setara kepada setiap peserta pemilu, dan memastikan bahwa proses pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilihan umum untuk mewujudkan masyarakat demokratis di Indonesia.<sup>53</sup>

Tanggung jawab dan wewenang KPU Kabupaten Ngawi meliputi:

---

<sup>53</sup> <https://kab-ngawi.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi>, diakses pada 24 Mei 2023

Sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU sebagai berikut:

1. Menciptakan program dan menetapkan anggaran;
2. Melaksanakan berbagai tahapan pelaksanaan pekerjaan di kabupaten (kota) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan menangani tahapan pelaksanaan PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan kerjanya; dan
4. Mengirimkan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memperbarui data pemilih berdasarkan data Pemilu terbaru dengan mempertimbangkan data kependudukan yang dibuat dan disampaikan oleh pemerintah dan dimasukkan ke dalam daftar pemilih; dan Memverifikasi data pemilih berdasarkan data Pemilu terbaru;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil pemilihan untuk anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara surat suara dan sertifikat penghitungan dan menyerahkannya kepada peserta pemilihan, Bawaslu Bupati/Kota, dan saksi KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota
9. Segera memeriksa hasil dan laporan yang disampaikan oleh Bupati/Bawasru Kota;

10. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemilihan dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota;
11. Menilai dan membuat laporan tentang seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh KPU Provinsi, KPU Provinsi, atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Membuat jadwal untuk kabupaten/kota Anda;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan surat suara ulang anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara surat suara ulang dan sertifikat surat suara ulang sesuai dengan PPK surat suara ulang;
4. Mengumumkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk memverifikasi hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5. Memberikan sanksi administratif, larangan sementara, dan peraturan kepada anggota PPK dan PPS yang terbukti mengganggu proses penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan keputusan Bawaslu,

Keputusan Bawaslu Provinsi, Keputusan Bawaslu Bupati/Kota, dan/atau peraturan perundang-undangan; dan

6. Melaksanakan kewenangan tambahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup>

## **B. Usaha KPU Kabupaten Ngawi Dalam Memberdayakan Rumah Pintar Pemilu Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat**

Pada penelitian ini menggunakan teori pendidikan politik yang diajukan oleh Brownhill dan Smart yang mengemukakan bahwa kurikulum pendidikan politik harus mencakup tiga komponen penting, yaitu pengetahuan, keterampilan, serta nilai procedural. Dalam upayanya untuk memberdayakan Rumah Pintar Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat dikatakan telah menyediakan sarana yang sesuai dengan pendidikan politik, apabila telah memenuhi kurikulum yang disebutkan sebelumnya.

### **a. Pengetahuan**

Komponen pertama dalam teori pendidikan politik menurut Brownhill dan Smart yang penting ialah pengetahuan. Menurut pandangan mereka, pengetahuan memainkan peran krusial dalam mempengaruhi keberhasilan pendidikan politik secara keseluruhan. Pentingnya pengetahuan dalam pendidikan politik terletak pada fakta bahwa tanpa pemahaman yang memadai, individu tidak dapat benar-benar terlibat dalam proses politik

---

<sup>54</sup> <https://kab-ngawi.kpu.go.id/page/read/35/tugas-dan-kewenangan>, diakses pada 24 Mei 2023



secara aktif dan berpartisipasi dengan cara yang benar. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai, individu dapat mengambil keputusan yang lebih informan dalam pemilihan umum, memahami dan mengevaluasi argumen politik, serta berpartisipasi dalam diskusi dan debat yang konstruktif. Pengetahuan juga memungkinkan individu untuk lebih memahami dan menghargai keragaman pandangan politik, sehingga mendorong toleransi, dialog, dan pemahaman yang lebih baik antara warga negara.

Dengan demikian, dalam implementasi Rumah Pintar Pemilu oleh KPU, penting bagi mereka untuk memastikan bahwa komponen pengetahuan yang komprehensif tercakup dalam kurikulum pendidikan politik yang mereka tawarkan. Melalui penguatan pengetahuan politik, Rumah Pintar Pemilu dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik warga negara, membekali mereka dengan pengetahuan yang diperlukan untuk terlibat secara aktif dan berpartisipasi dalam proses politik yang demokratis.

KPU memberikan pengetahuan mengenai berbagai materi tentang kepemiluan. Mulai dari konsep dasar pemilu, tahapan-tahapan pemilu, hingga bagaimana prosedur pemungutan suara. Materi-materi tersebut disampaikan dengan melalui sosialisasi.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Budi:

*“Tentu saja, karena di RPP sendiri kan ada modul-modulnya juga yang diterbitkan oleh KPU RI. Jadi dalam sosialisasi ada menggunakan proyektor, juga ada yang tanpa menggunakan proyektor tergantung situasi dan kondisinya masing-masing.”<sup>55</sup>*

Dari pendapat bapak Budi mengenai pengetahuan, didalam RPP sudah ada modul-modul ataupun materi-materi yang diterbitkan oleh KPU RI, sehingga didalam penyampaian ketika sosialisasi dapat menggunakan proyektor dan bisa tidak menggunakan proyektor.

Pendapat tersebut dikuatkan oleh ibu Eka:

*“Tentu saja kami KPU melakukan pendidikan pemilih dengan memberikan aspek pengetahuan, adanya pendidikan ialah untuk memberikan pengetahuan”<sup>56</sup>*

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Ibu Eka bahwasanya pendidikan politik yang diberikan oleh KPU Kabupaten Ngawi tentu saja terdapat aspek pengetahuan, karena adanya pendidikan ialah untuk memberikan pengetahuan.

Dari penjelasan Bapak Budi dan Ibu Eka, KPU memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui modul-modul yang telah diterbitkan oleh KPU RI, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dengan pengetahuan ini, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam memilih

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Budi pada 29 Mei 2023 di KPU Kabupaten Ngawi

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Eka pada 29 Mei 2023 di KPU Kabupaten Ngawi

pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga dapat memperkuat fundamental demokrasi di Indonesia.

b. Keterampilan

Komponen kedua dari teori pendidikan politik yang disampaikan oleh Brownhill dan Smart adalah keterampilan. Mereka berpendapat bahwa selain pengetahuan, keterampilan juga perlu dimasukkan dalam pelaksanaan pendidikan politik. Keterampilan politik mencakup kemampuan berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam kelompok, dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif.

Dalam konteks Rumah Pintar Pemilu yang diberdayakan oleh KPU, penting bagi mereka untuk memastikan bahwa keterampilan politik juga diajarkan dan ditingkatkan. Dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang melibatkan diskusi, simulasi, permainan peran, dan latihan berpikir kritis, Rumah Pintar Pemilu dapat membantu individu mengembangkan keterampilan politik yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik.

Dengan demikian, melalui penekanan pada pengembangan keterampilan politik, Rumah Pintar Pemilu dapat membantu warga negara menjadi lebih aktif, berpikir kritis, dan berpartisipasi dalam proses politik yang demokratis. Dengan memadukan pengetahuan dan keterampilan politik, pendidikan politik dapat memberikan landasan yang kuat bagi warga negara untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan masyarakat yang

lebih baik dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Pendidikan politik tidak hanya semata-mata diberikan melalui materi tetapi juga dengan penerapan. KPU Kabupaten Ngawi selain memberikan teori juga memberikan sebuah simulasi dalam pendidikan politiknya. Dalam ruang RPP terdapat ruang simulasi yang terdapat beberapa alat peraga dalam pemungutan suara di TPS mulai dari tata letak hingga ornament pemungutan suara. Ornamen yang dimaksud seperti kotak suara, bilik suara, alat coblos hingga perlengkapan administrasi dalam menunjang kegiatan pemungutan dan perhitungan suara. Selain itu, KPU juga melakukan sosialisasi pada beberapa sekolah dan mempraktekkan kegiatan pemilu menjelang adanya pemilihan osis. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Prima:

*“Kita dalam melakukan pendidikan politik tidak hanya ngomong soal teori saja, tetapi kita juga memberikan hal-hal yang menarik terkait dengan kepemiluan, seperti kita melakukan praktek. Biasanya kita melakukan praktek itu menjelang mereka melakukan pemilihan osis. Nah itu kita simulasikan sebagai pemilu seperti itu. Jadi langsung pada prakteknya. Nanti kita sediakan juga bilik dan kotaknya, tatacaranya juga kita mengajari, ada surat suara dan sebagainya. Itu yang selama ini kami lakukan.”<sup>57</sup>*

Dari penjelasan Ibu Prima KPU keterampilan dengan melakukan praktek yang biasanya praktek tersebut dilakukan ketika menjelang pemilihan OSIS. Mereka mensimulasikan kegiatan tersebut sebagai pemilu itu sendiri. Mereka menyediakan surat suara serta alat-alat yang dibutuhkan,

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Prima pada 30 Mei 2023 di KPU Kabupaten Ngawi

mereka juga mengajari tatacaranya. Simulasi ini bertujuan untuk melibatkan siswa secara langsung dalam proses demokrasi di lingkungan sekolah, sehingga mereka dapat memahami dan mengalami sendiri bagaimana cara melakukan pemilihan secara sah dan demokratis.

c. Nilai Procedural

Selain pengetahuan dan keterampilan, dalam sosialisasi oleh KPU, nilai-nilai procedural diajarkan kepada masyarakat. Hal ini penting karena aspek pengetahuan dan keterampilan saja tidak cukup untuk menciptakan masyarakat yang demokratis. Nilai-nilai procedural meliputi prinsip-prinsip dasar pemilu yang meliputi kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu.

Dalam materi kepemiluan yang disampaikan, akan terdapat pembahasan mengenai azas-azas pemilu yang dikenal dengan istilah LUBER JURDIL.

LUBER adalah singkatan dari Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia yang menggambarkan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pemilu. Sedangkan JURDIL merupakan singkatan dari Jujur, Adil.. Transparan dan Akuntabel, yang menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pemilihan.

Dengan memasukkan nilai-nilai procedural ini dalam Pendidikan Politik, diharapkan masyarakat dapat memahami betapa pentingnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar pemilu yang jujur dan adil. Dengan

demikian, diharapkan masyarakat menjadi pemilih yang sadar, bertanggung jawab, dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi Negara.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Budi:

*“Tentu saja itu lengkap kalau disini, seperti yang saya katakan disini ada modul-modulnya. Dan azaz pemilu sendiri yang jujur dan adil tentu saja harus diberikan”<sup>58</sup>*

Dari penjelasan bapak Budi dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten juga memberikan ajaran mengenai nilai procedural karena dalam pemilu sendiri juga sudah ada azaz yang harus diterapkan pada kepemiluan yaitu jujur dan adil.

Sebelum adanya covid 19, KPU membuat sebuah program untuk menarik pengunjung di Rumah Pintar Pemilu. Program tersebut adalah program give away. KPU membuat program tersebut untuk menarik masyarakat agar berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu. Namun program tersebut akhirnya terhenti dikarenakan wabah covid 19. Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan guna mengurangi risiko penyebaran virus dan menjaga keselamatan serta kesehatan masyarakat. Kemudian KPU Kabupaten Ngawi berusaha memberdayakan Rumah Pintar Pemilu Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat yang sepi pengunjung dengan jemput bola. Mereka melakukan langkah proaktif dengan menyampaikan materi-materi lewat sosialisasi yang disajikan pada Rumah Pintar Pemilu.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Budi pada 29 Mei 2023 di Kabupaten Ngawi

Dalam upaya ini, KPU Kabupaten Ngawi mengambil inisiatif untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas Rumah Pintar Pemilu. Mereka menyadari bahwa tingkat kunjungan yang rendah tidak efektif dalam menyampaikan pesan-pesan penting mengenai pendidikan politik kepada masyarakat. Oleh karena itu, KPU mengubah strategi dengan mengambil inisiatif untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

Melalui sosialisasi yang disampaikan pada Rumah Pintar Pemilu Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat, KPU memberikan materi-materi yang relevan dan menarik untuk menarik minat pengunjung. Mereka berupaya memberikan informasi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilu, prinsip-prinsip dasar pemilu yang jujur dan adil, serta nilai-nilai procedural yang harus dijunjung tinggi.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Prima :

*“Kami melakukan kegiatan yang sifatnya sosialisasi, dengan banyak berkomunikasi secara informal kepada masyarakat dan untuk saat ini dikarenakan kami mempunyai badan adhoc kami memanfaatkan mereka untuk proaktif.”<sup>59</sup>*

Ibu Prima menjelaskan bahwa pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan badan adhoc yang ada di kecamatan dan desa, jadi meskipun

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ibu Prima pada 30 Mei di KPU Kabupaten Ngawi

Rumah Pintar Pemilu tersebut sepi pengunjung KPU Kabupaten Ngawi berusaha untuk tetap menyampaikan materi-materi yang sudah disajikan dalam RPP. Selain itu untuk memberdayakan RPP, KPU Kabupaten Ngawi juga melakukan promosi RPP yang dilakukan dengan cara:

1. Komisioner KPU Kabupaten Ngawi menyampaikan secara langsung saat hadir dalam berbagai forum pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat. Disaat yang sama, juga dilakukan membagikan flyer yang didalamnya memuat materi RPP.
2. Melakukan sosialisasi secara massif di media daring (website dan social media) terkait materi RPP, kegiatan ini bertujuan agar masyarakat menyadari bahwa RPP merupakan sumber informasi serta referensi utama Pemilu. Diharapkan dari kegiatan ini masyarakat juga tergerak untuk mengunjungi RPP.<sup>60</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>60</sup> Laporan RPP KPU Kabupaten Ngawi



Gambar 4.7 Flyer



Sumber : Laporan RPP KPU Kabupaten Ngawi

Ibu Prima selaku Ketua Kabupaten Ngawi menyampaikan bahwa:

*“Jika berbicara di Kabupaten Ngawi memang sebelum dan sesudah adanya RPP memang berbeda untuk partisipasi dan itu berpengaruh juga pada pola kerja di KPU juga yaitu jadi lebih tertata.”<sup>61</sup>*

Penjelasan daripada wawancara dengan Ibu Prima diatas adalah bahwa meskipun sepi pengunjung, KPU berhasil meningkatkan partisipasi pemilih dan mengubah pola kerja di KPU menjadi lebih terstruktur melalui keberadaan Rumah Pintar Pemilu. Meskipun minimnya pengetahuan tentang Rumah Pintar Pemilu, KPU telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan RPP ini. Sepinya pengunjung di Rumah Pintar

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Prima pada 30 Mei 2023 di KPU Kabupaten Ngawi

Pemilu ini memang benar adanya dikarenakan masih minim orang yang tau mengenai Rumah Pintar Pemilu tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rodin Sebagai ketua organisasi Anshor Kabupaten Ngawi bahwa:

*“Saya belum pernah mendengar mengenai Rumah Pintar Pemilu, terutama kami yang berada di pedesaan ini tentu untuk informasi berbeda dengan masyarakat di wilayah kota, tapi untuk sosialisasi sendiri KPU sudah melaksanakannya.”<sup>62</sup>*

Dari penjelasan bapak Rodin dapat disimpulkan bahwa memang masyarakat belum mengenal Rumah Pintar Pemilu khususnya pedesaan yang membuat sepinya pengunjung di Rumah Pintar Pemilu.

Sepinya pengunjung di Rumah Pintar Pemilu tersebut bukan hanya karna ketidak tahuan masyarakat mengenai Rumah Pintar Pemilu tersebut, akan tetapi ada beberapa alasan contohnya letak Rumah Pintar Pemilu yang kurang strategis. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kamid anggota dari organisasi masyarakat Pemuda Muhammadiyah yaitu:

*“Saya tahu mengenai Rumah Pintar Pemilu tetapi saya belum pernah mengunjunginya, dikarenakan lokasinya yang tidak strategis. Coba saja lokasi Rumah Pintar Pemilu strategis, didekat tempat wisata contohnya karena sulit untuk berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu ketika tidak ada kepentingan yang lain terlebih lagi jarak yang jauh.”<sup>63</sup>*

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Rodin pada 31 Mei 2023 di Kecamatan Kendal

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Kamid pada 31 Mei 2023 di Kecamatan Kendal

Dari pernyataan Bapak Kamid maka dapat disimpulkan bahwa letak Rumah Pintar Pemilu yang kurang strategis juga menjadi penyebab jarang dikunjunginya Rumah Pintar Pemilu.

Pendidikan politik yang diberikan di RPP Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat sudah memang sudah memuat kurikulum yang berisikan pengetahuan, keterampilan, serta nilai procedural pada teori pendidikan politik oleh Brownhill dan Smart seperti yang disampaikan oleh saudari Lina mahasiswa alumni STKIP Modern Ngawi pada 2019 bahwa:

*“Sewaktu berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu saya mendapatkan pengetahuan mengenai kepemiluan, bagaimana cara-cara pemilu, bagaimana tahapan pemilu, bagaimana alurnya. Kemudian untuk keterampilannya juga diberikan dengan simulasi maket, jadi kami diperlihatkan maket bagaimana alur pencoblosan seperti itu. Disana juga ada ruangan untuk simulasi sendiri yaitu untuk prakteknya. Untuk nilai procedural ada di awal sama ketika penyampaian pengetahuan. Disini kita diberi materi bagaimana nilai-nilai dasar kepemiluan dan disana saya bisa menambah wawasan.”<sup>64</sup>*

Dari pernyataan Lina yang pernah berkunjung ke RPP tersebut, selama kunjungannya ke RPP ia mendapatkan pengetahuan mengenai kepemiluan, mulai dari bagaimana cara melakukan pemilu, tahapan pemilu, dan bagaimana alurnya. Keterampilan pada RPP tersebut diberikan melalui sebuah simulasi maket, ia diperlihatkan maket bagaimana alur pencoblosan pemilu di TPS. Disana juga ada ruangan untuk praktek sendiri, kemudian ilia procedural juga diberikan ketika penyampaian pengetahuan, disana ia diberi materi

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Lina Mahasiswa alumni STKIP Modern Ngawi Secara Daring

mengenai nilai-nilai dasar kepemiluan dan ia bisa menambah wawasan mengenai kepemiluan.

Dengan memanfaatkan Rumah Pintar Pemilu Dr. Krt Radjiman Wediodiningrat, KPU Kabupaten Ngawi telah berhasil memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui beberapa informan di atas. Teori Brownhill dan Smart relevan dengan pendidikan politik yang ditawarkan oleh KPU. Pendidikan politik yang diberikan melalui Rumah Pintar Pemilu mengandung pengetahuan, keterampilan, serta nilai procedural yang penting dalam memahami dan melaksanakan proses demokrasi.

Dalam konteks pengetahuan, Rumah Pintar Pemilu memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai proses pemilihan umum, hak-hak pemilih, serta peran masyarakat dalam menjalankan hak pilihnya. Hal ini membantu masyarakat memahami pentingnya proses demokrasi dan menjadi warga negara yang lebih berpengetahuan mengenai kepemiluan.

Selain itu, melalui Rumah Pintar Pemilu, KPU juga memberikan keterampilan kepada masyarakat dalam hal partisipasi politik. Masyarakat diajarkan cara mendaftar sebagai pemilih, cara menggunakan hak pilih dengan benar, serta cara terlibat aktif dalam kampanye politik yang bertanggung jawab. Keterampilan ini membantu masyarakat untuk berperan serta secara efektif dalam proses demokrasi.

Lebih lanjut, pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU melalui Rumah Pintar Pemilu juga mendorong penerapan nilai procedural yang penting dalam demokrasi. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan partisipasi aktif ditanamkan kepada masyarakat. Masyarakat juga diajarkan untuk menghormati hak-hak pemilih lainnya, menghargai perbedaan pendapat, serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam proses pemilihan umum.

Dengan menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai procedural, Rumah Pintar Pemilu Dr. Krt Radjiman Wediodiningrat mampu memberikan pendidikan politik yang komprehensif kepada masyarakat Kabupaten Ngawi. Dengan demikian, KPU telah berhasil memberikan bekal yang penting bagi masyarakat dalam menjalankan peran mereka sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam proses politik dan memahami pentingnya demokrasi dalam kehidupan nasional dan internasional.

Usaha daripada KPU Kabupaten Ngawi dalam mengoptimalkan RPP sebelum adanya covid 19 ialah dengan membuat sebuah program give away. Namun, setelah adanya covid 19 program tersebut harus dihentikan kemudian KPU berusaha untuk mengoptimalkan RPP dengan jemput bola yaitu dengan adanya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dikarenakan untuk menunggu masyarakat datang mengunjungi RPP sangat tidak efektif. Selain itu juga memakan waktu yang lama sehingga materi-materi dalam RPP tidak bisa

tersampaikan karena yang paling penting daripada RPP ini adalah materi-materinya.

### **C. Strategi KPU Kabupaten Ngawi Dalam Memaksimalkan Rumah Pintar Pemilu**

Beberapa strategi dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi untuk memaksimalkan Rumah Pintar Pemilu Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat sebagai sarana pendidikan politik diantaranya:

#### **1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pendidikan pemilih**

KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekolah-sekolah serta beberapa organisasi mengenai pendidikan pemilih. KPU Kabupaten Ngawi melakukan sosialisasi pendidikan pemilih di berbagai desa seperti desa Ngancar, desa Kendal, Desa Sine, dll. KPU juga melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih di sekolah-sekolah seperti di MAN 3 Ngawi, MAN 2 Ngawi, SMAN 1 Kedunggalar SMK Trisakti, SMK PGRI 4Ngawi, dll. Beberapa organisasi yang pernah mendapatkan sosialisasi pendidikan pemilih yaitu Fatayat, hingga sosialisasi di forum arisan ibu-ibu. Dikarenakan saat ini menjelang pemilu 2024, maka KPU telah membentuk Badan Adhoc yaitu penyelenggara Pemilu di tingkat bawah. KPU juga memanfaatkan mereka untuk melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat yang tidak bisa di jangkau oleh KPU sendiri. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk setiap sosialisasi adalah sebesar

satu juta rupiah untuk 50 orang. Anggaran tersebut mencakup biaya yang terkait dengan penyelenggaraan sosialisasi, seperti biaya transportasi, makanan dan minuman, peralatan presentasi, dan materi promosi atau informasi yang akan disampaikan kepada peserta sosialisasi.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Prima:

*“Kita tetap berupaya memaksimalkan dan memperkenalkan Rumah Pintar Pemilu terutama pada saat kita melakukan sosialisasi”<sup>65</sup>*

Dari penjelasan ibu Prima dapat ditarik kesimpulan bahwa KPU memperkenalkan Rumah Pintar Pemilu ketika melakukan sosialisasi, jadi dalam melaksanakan sosialisasi bukan hanya materi-materi dari Rumah Pintar Pemilu saja yang disampaikan tetapi juga keberadaan Rumah Pintar Pemilu juga disampaikan agar semakin banyak masyarakat yang mengetahuinya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Prima pada 30 Mei 2023 di KPU Kabupaten Ngawi

Gambar 4.8 Sosialisasi pada Siswa SMK Trisakti Ngawi



Sumber: Web KPU Kabupaten Ngawi

Sosialisasi pada gambar tersebut dilaksanakan di SMK Trisakti Ngawi pada 22 Maret 2022 yang bertempat di GOR SMK Trisakti Ngawi. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh KPU untuk memberikan pendidikan pemilih kepada siswa siswi kelas 11. Terdapat kurang lebih 120 siswa yang mengikuti sosialisasi tersebut. Materi dari sosialisasi ini adalah tentang pemilu dan pemilihan serta pendidikan pemilih. Bapak Sudarsono devisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM adalah narasumber dari materi tersebut. Pentingnya memilih bagi warga Negara, termasuk para pelajar yang telah memiliki hak pilih juga disampaikan kepada para siswa.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Web KPU Kabupaten Ngawi



## 2. Memanfaatkan Media Sosial

KPU memanfaatkan media sosial untuk menginformasikan mengenai berbagai informasi, serta berbagai kegiatan KPU. KPU mengaktifkan berbagai media sosial dari Instagram, Youtube, Tiktok, Website, Facebook, hingga twitter. Selain itu, semua informasi dapat diakses melalui website KPU. Informasi apapun dapat di akses melalui PPID di website kpu Kabupaten Ngawi. KPU memanfaatkan Youtube untuk melakukan podcast mengenai kepemiluan. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mengaktifkan media sosial adalah sebesar tiga juta rupiah per bulan. Anggaran ini mencakup biaya yang terkait dengan pengelolaan dan promosi melalui platform media sosial seperti pengembangan konten kreatif, pengelolaan akun, dan analisis kinerja.

Dengan anggaran tersebut, KPU dapat mengoptimalkan kehadiran dan visibilitasnya di berbagai platform media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau YouTube. Kegiatan yang dapat didukung oleh anggaran ini meliputi pembuatan konten edukatif, berbagi informasi terkait pemilu, mempromosikan acara atau kampanye, serta meningkatkan interaksi dan keterlibatan pengguna melalui iklan atau konten yang menarik.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Prima:

*“Kami juga mengaktifkan segala macam medsos yang kita punya seperti twitter, facebook, intagram, website, itu dalam naungan Rumah Pintar Pemilu untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin*

*utnuk menyampaikan berita-berita tentang kepemiluan, dan bukan hanya berkaitan dengan tahapan tetapi juga hal-hal yang penting yang perlu diketahui oleh masyarakat, kami juga meminta kepada seluruh jajaran kita sampai ditingkat bawah untuk menyebarluaskan medsos kita.”<sup>67</sup>*

Ibu Prima menjelaskan bahwa strategi yang digunakan oleh Ibu Prima juga ialah mengaktifkan segala media sosial yang dimiliki oleh KPU mulai dari twitter, facebook, instagram, website, hingga tiktok dalam naungan Rumah Pintar Pemilu untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam menyampaikan berita-berita mengenai kepemiluan.

Beberapa media sosial yang diaktifkan oleh KPU diantaranya:

a. Instagram

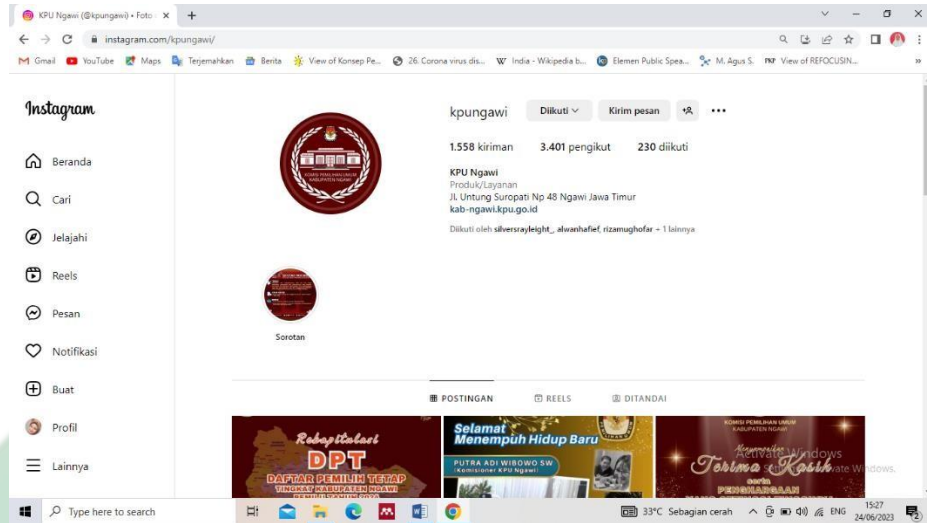
Instagram merupakan media sosial yang di gandrungi masyarakat zaman sekarang. Orang yang tidak memiliki akun instagram pasti akan dikatakan kudet (kurang update).

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Prima pada 30 Mei 2023 di KPU Kabupaten Ngawi

Gambar 4.9 Instagram KPU Kabupaten Ngawi



Sumber : Web KPU Kabupaten Ngawi

Instagram KPU Kabupaten Ngawi ini memiliki 3.401 pengikut, dan 230 yang diikuti dengan jumlah postingan 1.558. berbagai informasi di update di Instagram mulai dari kegiatan KPU Kabupaten Ngawi, pencapaian KPU Kabupaten Ngawi, hingga informasi-informasi kepelembagaan di update di indtgram.

b. Youtube

Youtube merupakan tempat dimana kita bisa mengakses berbagai video, mulai dari durasi yang panjang dengan rentan waktu ber jam-jam hingga video dengan durasi pendek atau biasa disebut short video.

Gambar 4.10 Youtube KPU Kabupaten Ngawi



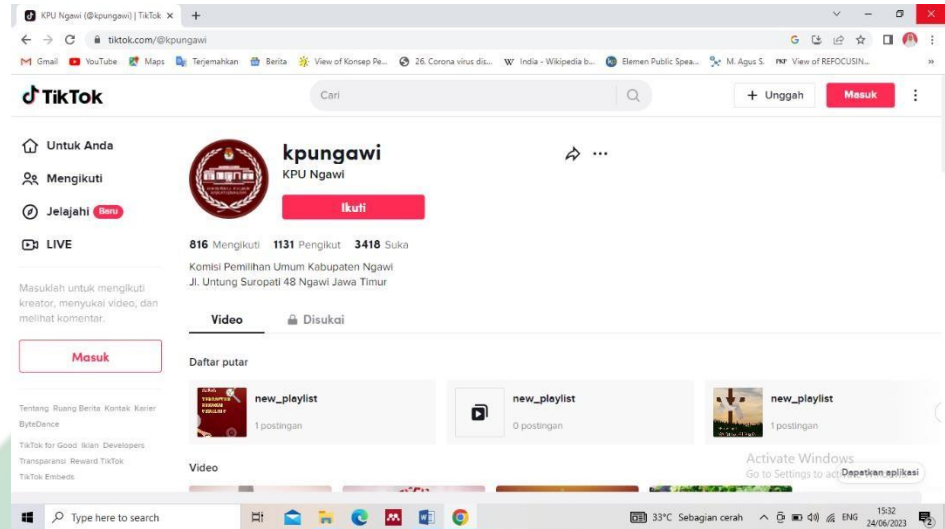
Sumber : Web KPU Kabupaten Ngawi

Youtube KPU Kabupaten Ngawi memiliki 1,41 ribu subscriber dengan 36 video. Konten-konten yang di upload di youtube KPU Kabupaten Ngawi ini bermacam-macam mulai dari perekrutan, sosialisasi, pelantikan, hingga kegiatan KPU kabupaten Ngawi.

### c. Tiktok

Tiktok merupakan media sosial yang baru muncul beberapa tahun akan tetapi penggunaanya sudah meroket. Bahkan sudah merambah mulai dari anak-anak hingga orang tua sekalipun tidak ada yang tidak punya akun tiktok. Berbagai konten dapat dicari di tiktok. Mulai dari konten masak, konten music, konten edukasi, dll. Sehingga KPU Kabupaten Ngawi memanfaatkan tiktok untuk menjangkau masyarakat agar lebih mengenal KPU.

Gambar 4.11 Tiktok KPU Kabupaten Ngawi



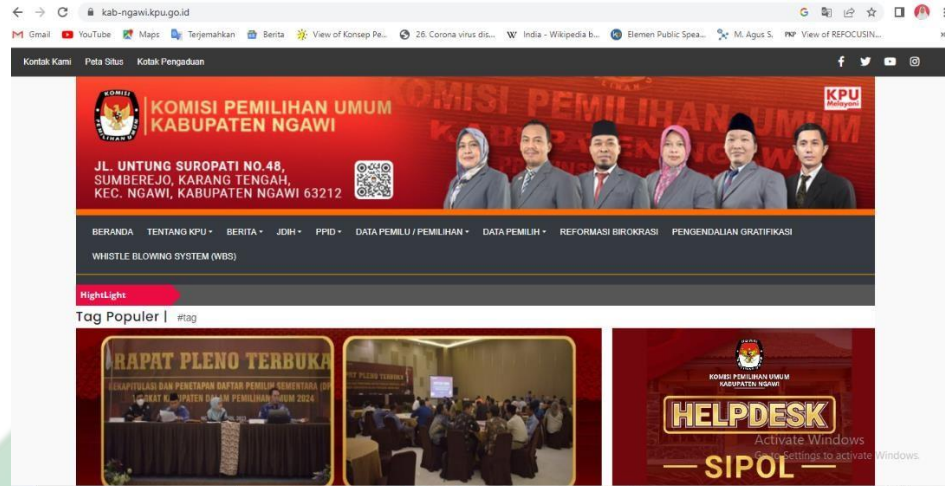
Sumber : Tiktok KPU Kabupaten Ngawi

Akun tiktok KPU Kabupaten Ngawi memiliki 1131 jumlah pengikut dan 816 jumlah yang diikuti dengan jumlah suka mencapai 3418. Sama seperti akun media sosial KPU lainnya, isi konten tiktok KPU Kabupaten Ngawi adalah kegiatan KPU, informasi-informasi mengenai kepeMiluan, hingga berbagai video pendek yang menarik mengenai KPU Kabupaten Ngawi.

d. Website

Website merupakan situs web yang dikelola seseorang ataupun sekelompok orang, atau organisasi yang berisikan informasi mengenai suatu hal, sehingga ketika seseorang ingin mengakses informasi mengenai organisasi atau kelompok tertentu, orang tersebut dapat mengunjungi websitenya.

Gambar 4.12 Website KPU Kabupaten Ngawi



Sumber : Web KPU Kabupaten Ngawi

Di website KPU ini berbagai informasi dapat diakses, mulai dari informasi mengenai sosialisasi, informasi, mengenai tahapan pemilihan, hingga berbagai informasi-informasi terbaru oleh KPU Kabupaten Ngawi. Di website KPU juga telah ada berbagai modul mulai dari RPP, Buku, pengaduan masyarakat, dll. Dari berbagai media sosial lainnya website KPU lebih lengkap informasinya, sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak dapat mengakses website tersebut.

e. Facebook

Facebook merupakan akun sosial media yang digunakan masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak, muda, dewasa, hingga usia tua. Berbagai informasi dapat diakses melalui akun

facebook. Fitur-fitur facebook semakin canggih seiring berkembangnya zaman. Facebook dapat mengupload berbagai konten mulai dari foto, video, hingga catatan-catatan.

Gambar 4.13 Facebook KPU Kabupaten Ngawi



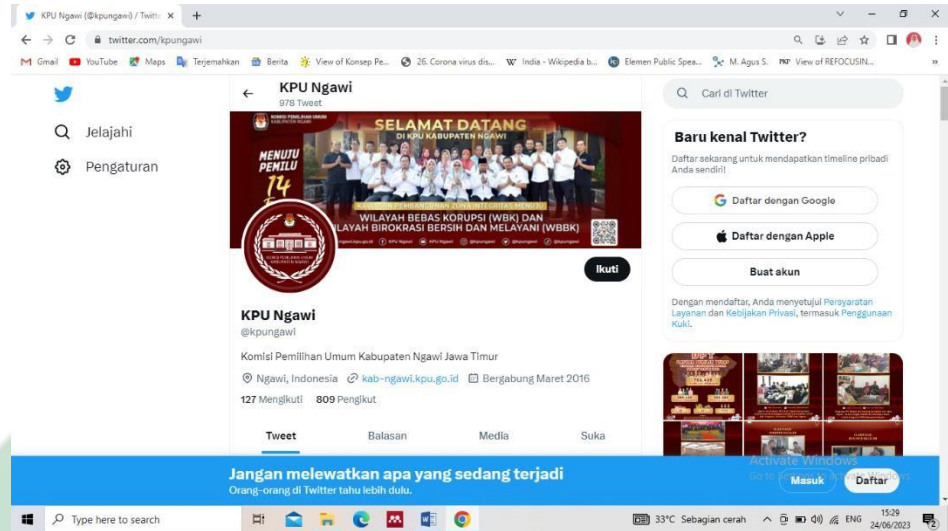
Sumber : Web KPU Kabupaten Ngawi

Facebook KPU Kabupaten Ngawi ini memiliki 2,9 ribu pengikut dan 4 mengikuti. Konten-konten yang di upload di facebook KPU Kabupaten Ngawi ini berisikan mengenai kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Ngawi. Selain itu di facebook, KPU juga mengupload berbagai video-video dengan jangka waktu pendek yang menampilkan berbagai kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Ngawi.

f. Twitter

Twitter merupakan sosial media yang kebanyakan di gandrungi oleh kaum anak muda, kebanyakan meme di upload di twitter.

Gambar 4.14 Twitter KPU Kabupaten Ngawi



Sumber : Web KPU Kabupaten Ngawi

Twitter KPU Kabupaten Ngawi ini memiliki 809 pengikut dan 127 diikuti. Konten yang di upload juga sama seperti konten-konten yang di upload di akun sosial media KPU Kabupaetn Ngawi lainnya.

Akan tetapi pengikut dari akun twitter KPU Kabupaten Ngawi ini lebih sedikit dibandingkan dengan akun sosial media KPU Kabupaten Ngawi yang lainnya.

### 3. Melakukan kerjasama dengan beberapa sekolah

Sesekali KPU juga melakukan kerjasama dengan beberapa sekolah untuk mengunjungi Rumah Pintar Pemilu. Meskipun tidak satu sekolah diajak oleh KPU, tetapi KPU menyediakan kuota hanya untuk beberapa siswa saja. Anggaran yang dialokasikan untuk bekerjasama dengan sekolah untuk membawa siswa untuk berkunjung ke sekolah sudah termasuk ke



anggaran sosialisasi karena anggaran ini diperlukan untuk transportasi yang masuk ke anggaran sosialisasi. Sekolah yang diajak untuk mengunjungi RPP ialah salah satunya SMA Mambaul Hikmah Paron.

Gambar 4.15 KPU Ngawi Ajak Pelajar Kunjungi RPP



Sumber: Web KPU Kabupaten Ngawi

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, Sudarsono mengunjungi pelajar di SMA Mambaul Hikmah Paron. Dalam kesempatan tersebut, Pria yang akrab disapa Pak Dar itu mengajak siswa-siswi untuk memahami makna memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pria yang membidangi Sosialisasi dan Pendidikan pemilih tersebut, juga mengajak peserta untuk berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu Dr Radjiman

Wedyodiningrat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi. Didalamnya bisa diskusi maupun menambah referensi kepemiluan.<sup>68</sup>

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Prima:

*“Kemudian sesekali kita juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk membawa, kita mengajak, kita sediakan dan fasilitasi untuk transportasinya kesini ke KPU agar mereka bisa melihat Rumah Pintar Pemilu.”<sup>69</sup>*

Ibu Prima menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan oleh KPU juga sesekali bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk membawa siswanya berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu yang di fasilitasi dan transportasi yang disediakan oleh KPU.

Strategi yang disampaikan oleh Ibu Prima sangat jelas, menunjukkan bahwa KPU telah melakukan upaya maksimal dalam memanfaatkan RPP (Ruang Publik Pemilihan) dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui sosialisasi kepada masyarakat secara luas, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Selain itu, KPU juga bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk mengajak pelajar berkunjung ke RPP, memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya pemilu dan tata cara pelaksanaannya. Melalui kunjungan ini, diharapkan pelajar dapat memahami secara langsung bagaimana proses pemilihan berlangsung dan

---

<sup>68</sup> Web KPU Kabupaten Ngawi

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Prima pada 30 Mei 2023 di KPU Kabupaten Ngawi

mengenal lebih dekat dengan peran serta fungsi KPU. Selain itu, KPU juga mengaktifkan segala media sosial yang dimilikinya sebagai sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan sosial media, KPU dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan memberikan pemahaman yang lebih mudah diakses tentang pentingnya pemilihan dan keterlibatan aktif dalam proses demokrasi.

Strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi dalam mengoptimalkan RPP Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pendidikan pemilih, memanfaatkan media sosial, serta bekerjasama dengan beberapa sekolah.

#### **D. Kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Ngawi dalam memberdayakan Rumah Pintar Pemilu**

Dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi menghadapi beberapa kendala. Beberapa kendala tersebut antara lain:

##### **1. Fasilitas**

Fasilitas yang ada di RPP Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat di Kabupaten Ngawi dapat dikatakan masih kurang memadai. Dalam RPP tersebut, penggunaan proyektor menjadi pilihan utama untuk penyampaian materi. Meskipun proyektor dapat digunakan untuk menampilkan gambar, video, dan materi pendidikan politik lainnya, penggunaannya mungkin sedikit ribet atau membutuhkan penyesuaian teknis yang lebih banyak.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak budi:

*“Kalo kendala pada saat ini seperti pada museum nya, agar RPP kita berbasis digital maka kita perlu alat-alatnya, seperti ketika teman-teman kita ketika studi banding ke Bogor RPP nya itu sudah menggunakan Smart Tv yang touch screen sehingga semua informasi bisa didapatkan disitu.”<sup>70</sup>*

Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Budi dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dengan RPP di beberapa kota, seperti contohnya RPP di Kota Bogor, yang telah mengadopsi teknologi yang lebih maju dengan menggunakan smart TV. Penggunaan smart TV dalam RPP memberikan banyak keuntungan dalam penyampaian materi pendidikan politik.

Smart TV memungkinkan materi-materi pendidikan politik disajikan secara interaktif dan menarik. Selain itu, dengan adanya smart TV, penggunaan sumber daya digital seperti presentasi slide, video pembelajaran, dan akses langsung ke sumber informasi yang relevan dapat lebih mudah dilakukan. Penggunaan teknologi yang canggih ini juga memberikan pengalaman belajar yang lebih modern dan menyenangkan.

Meskipun RPP Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat di Kabupaten Ngawi saat ini masih menggunakan proyektor, penting untuk terus melakukan peningkatan fasilitas. Memperbarui dan mengadopsi teknologi yang lebih canggih, seperti smart TV, dapat meningkatkan efektivitas dan daya tarik

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Budi pada 29 Mei 2023 di KPU Kabupaten Ngawi

pembelajaran politik bagi masyarakat. Dengan cara ini, pesan-pesan penting mengenai pendidikan politik dapat disampaikan dengan lebih baik dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan bagi pengunjung RPP.

## 2. Anggaran

Untuk membeli sarana prasarana atau fasilitas yang diperlukan dalam RPP, tentunya memerlukan anggaran yang memadai. Anggaran tersebut sangat penting dalam memenuhi kebutuhan RPP agar dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat di Kabupaten Ngawi.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi:

*“Selain itu juga perlunya anggaran untuk membeli sarana prasarana tersebut serta untuk menjalankan strategi-strategi pengembangan RPP.”<sup>71</sup>*

Bapak Budi juga menjelaskan bahwa untuk membeli sarana-prasarana serta untuk menjalankan strategi-strategi diatas tentu saja anggaran diperlukan.

Hal ini juga diperkuat oleh Ibu Eka:

*“Untuk saat ini kendala dari Rumah Pintar Pemilu adalah terletak di anggaran, karena tidak adanya pembiayaan khusus untuk memberdayakan Rumah Pintar Pemilu.”<sup>72</sup>*

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Budi pada 29 Mei 2023 di KPU Kabupaten Ngawi

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu Eka pada 29 Mei 2023 di KPU Kabupaten Ngawi

Ibu Eka juga menambahkan bahwa kendala daripada RPP saat ini ada pada anggaran karena tidak adanya pembiayaan khusus untuk memberdayakan Rumah Pintar Pemilu.

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memberdayakan RPP dan meningkatkan kunjungan masyarakat adalah dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat. Dengan menjalin kerja sama ini, RPP dapat membawa beberapa pelajar masuk untuk mengikuti kegiatan pendidikan politik. Namun, untuk mengimplementasikan strategi ini, diperlukan anggaran yang mencakup berbagai aspek, seperti transportasi, serta pemenuhan kebutuhan lainnya. Namun, masalahnya adalah saat ini pemerintah pusat tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk memberdayakan RPP.

### 3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Mengacu pada keputusan terbaru KPU yang menetapkan jumlah minimal sumber daya manusia (SDM) sebanyak 25 orang, situasinya menjadi tantangan bagi KPU Kabupaten Ngawi. Saat ini, jumlah SDM yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Ngawi hanya 11 orang untuk ASN (Aparatur Sipil Negara). Jumlah ini jelas masih sangat jauh dari target yang ditetapkan.

Dengan jumlah SDM yang terbatas, KPU Kabupaten Ngawi akan menghadapi kendala dalam melaksanakan berbagai kegiatan terkait pendidikan politik dan pengelolaan RPP. Tugas-tugas yang harus diemban

oleh KPU, seperti sosialisasi, pelatihan, pengelolaan Rumah Pintar Pemilu, dan sebagainya, membutuhkan tenaga yang memadai untuk memastikan penyampaian materi yang efektif dan partisipasi masyarakat yang maksimal.

Meskipun jumlah SDM di KPU Kabupaten Ngawi saat ini masih jauh dari target, upaya maksimal perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan politik tetap dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang optimal dari RPP.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Budi:

*“Lalu dari SDM kami juga sangat kurang , karena jika mengacu pada keputusan KPU kita minimal 16. Tapi kalo keputusan yang baru sekarang 25, dan kita sekarang pegawainya saja termasuk saya yang ASN baru 11, jadi masih sangat jauh dari sisi jumlahnya.”<sup>73</sup>*

Dari penjelasan Bapak Budi bisa disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada di KPU Kabupaten Ngawi masih kurang, dimana pada keputusan KPU yang minimal 25 orang untuk ASN di KPU Kabupaten Ngawi masih 11 orang.

Dalam pelaksanaan segala sesuatu, kendala-kendala sering kali akan ditemui, termasuk dalam upaya KPU dalam memberdayakan RPP Dr.Krt. Radjiman Wediodiningrat. KPU menghadapi berbagai kendala, baik dalam hal fasilitas, sumber daya manusia, maupun anggaran yang tersedia.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Budi pada 29 Mei 2023 di KPU Kabupaten Ngawi

Kendala terkait fasilitas dapat mencakup keterbatasan ruang, peralatan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengoptimalkan RPP. Selain itu, kendala terkait sumber daya manusia juga dapat menjadi tantangan bagi KPU dalam memberdayakan RPP. KPU membutuhkan tenaga ahli dan profesional yang terampil dalam mengelola dan mengoperasikan RPP dengan efektif. Namun, keterbatasan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia dapat mempengaruhi kinerja dan efisiensi RPP. Selanjutnya, kendala anggaran juga dapat menjadi hambatan bagi KPU dalam memberdayakan RPP. Sumber daya keuangan yang terbatas dapat membatasi kemampuan KPU dalam melakukan perbaikan, pengembangan, dan promosi RPP secara optimal.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan analisis data tentang Usaha KPU Kabupaten Ngawi dalam memberdayakan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dapat disimpulkan

1. KPU Kabupaten Ngawi berusaha memberdayakan Rumah Pintar Pemilu yang sepi pengunjung dengan cara jemput bola. Pihak KPU melakukan langkah yang proaktif yaitu dengan menyampaikan materi-materi yang disajikan pada Rumah Pintar Pemilu melalui sosialisasi. KPU menyadari bahwa dengan menunggu masyarakat untuk datang ke Rumah Pintar Pemilu sendiri kurang efektif karena akan memakan waktu dengan begitu KPU mengubah strateginya dengan berinisiatif untuk mendekati diri kepada masyarakat. Mereka juga memanfaatkan adanya badan adhoc yang ada di kecamatan dan desa untuk menyampaikan materi-materi tersebut. KPU juga melakukan promosi Rumah Pintar Pemilu dengan beberapa cara diantaranya: pertama, yaitu menyampaikan secara langsung saat hadir dalam berbagai forum pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat. Di momen yang sama, KPU juga membagikan flyer yang didalamnya memuat materi-materi RPP. Kedua, KPU juga melakukan sosialisasi secara massif di media daring terkait materi RPP.

2. KPU Kabupaten Ngawi melakukan beberapa strategi untuk memaksimalkan Rumah Pintar Pemilu Dr. Krt. Radjiman Wediodiningrat sebagai sarana pendidikan politik diantaranya: *Pertama*, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pendidikan pemilih. KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekolah-sekolah serta beberapa organisasi mengenai pendidikan pemilih. *Kedua*, Memanfaatkan Media Sosial. KPU memanfaatkan media sosial untuk menginformasikan mengenai berbagai informasi, serta berbagai kegiatan KPU. KPU mengaktifkan berbagai media sosialnya, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi. *Ketiga*, Bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk mengunjungi RPP. Sesekali KPU juga mengajak beberapa sekolah untuk mengunjungi Rumah Pintar Pemilu. Dalam memberdayakan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik, KPU memiliki beberapa kendala yaitu; *Pertama*, Fasilitas yang ada di KPU Kabupaten Ngawi masih kurang. *Kedua*, Tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk memberdayakan Rumah Pintar Pemilu sendiri. *Ketiga*, Kurangnya SDM di KPU Kabupaten Ngawi.

## **B. Saran**

Rumah Pintar Pemilu adalah sarana pendidikan politik bagi masyarakat, jadi perlu didukung oleh semua orang, mulai dari penyelenggara hingga masyarakat. KPU harus lebih inovatif lagi dalam memberdayakan Rumah Pintar Pemilu agar lebih banyak orang yang berkunjung. Selain itu, RPP juga

dapat mengajukan proposal dan mengadakan dialog dengan pemerintah daerah untuk menggali kemungkinan dukungan anggaran dari sumber-sumber lain yang tersedia. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menjelaskan manfaat dan pentingnya RPP dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Khabib Alia. "Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Distro Di Kota Surakarta)." *DutaCom Journal* 9, no. 1 (2015): 43–54.  
<http://journal.stmikdb.ac.id/index.php/dutacom/article/view/17>.
- "Bab II Tinjauan Pustaka." *Universitas Muhammadiyah*, no. 1 (2009): 10–32.
- Dewi, Agustina Laksmi. "Peranan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dan Kepemiluan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah Mursalah," 2021.
- Djuyandi, Yusa. "Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum." *Humaniora* 5, no. 2 (2014): 1202.  
<https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3263>.
- Dkk, Anugrah P. Telaumbanua. "Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak." *Perspektif* 10, no. 2 (2021): 627–43.
- Dr. Farida Nugrahani, M.Hum. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Vol. 1, 2008. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdp/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>.
- Dr. H. Abdul Manab, M. Ag. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. *Japanese Journal of Physical Fitness and Sports Medicine*. Vol. 17, 2015.
- Handoyo, Eko, and Puji Lestari. *Pendidikan Politik*. Pertama. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2017.
- Hariyanti. "Pendidikan Pemilih Sebagai Sumber Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Peserta Didik," 2017.
- Henry Wahyono & Laila Kholid Alfirdaus. "Rumah Pintar Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Sebagai Pusat Pembelajaran Pemilih." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 3 (2021): 1170–75.  
<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.516>.
- Imam Alfikri Paratama, Idrus Affandi. "Peran Pendidikan Politik Pada Organisasi Mahasiswa KAMMI Dan IMM Di Kota Pangkalpinang Dalam Pembentukan Budaya Politik Pancasila," n.d.
- Isnaini, Azizatul. "Pendidikan Politik Pada Pondok Pesantren Abu Manshur Kabupaten Cirebon" 11, no. 1 (2022): 38–50.

- Jiranda, Waldi, La Ode Harjudin, and La Bilu. "Peran Rumah Pintar Pemilu KPU Bombana Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kabupaten Bombana," 2019, 89–99.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Lubis, Hermansyah. "Efektivitas Sosialisasi Pilkada Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kpu Kota Medan," 2018.
- Lubis, Marwan, Nuril Mahda Rangkuti, and Moelky Ardan. "Evaluasi Geometrik Jalan Pada Tikungan Laowomaru." *Semnastek Uisu 2019*, 2019, 37–43. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/semnastek/article/view/1350>.
- Maharani, Dewi Kartika. "Efektivitas Kinerja Program Rpp (Rumah Pintar Pemilu) Dalam Membangun Tingkat Pendidikan Politik Masyarakat Pada Pilkada 2020 Kota Makassar." *Suparyanto Dan Rosad (2015 5, no. 3 (2020): 248–53*.
- Marzuki, Suparman. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 393–412.
- Masputri, Mutia Eka, Al Rafni, and Susi Fitria Dewi. "Upaya Kpu Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik." *Journal of Civic Education* 2, no. 1 (2019): 67–75.
- Mudjia Rahardjo. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif." *Repository UIN Malang*, 2011.
- Nazlia, Nizar, Heri Kusmanto, Muhammad Aswin Hasibuan, and Bahrum Jamil. "Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Medan)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 1, no. 1 (2019): 20–27.
- Ngawi, KPU Kabupaten. "LAPORAN PENGELOLAAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2019," 2019.
- Nurdinar, Almi, Iyep Candra Hermawan, Banan Sarkosih, and Universitas Suryakencana. "Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Kepemimpinan Peserta Didik Pada Organisasi Kesiswaan Di SMA Pasundan Cicalongkulon" 10, no. 1 (2020).
- Pasaribu, Payerli. "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 5, no. 1 (2017): 51.
- Pulungan, Muhammad Choirullah, Mudiwati Rahmatunnisa, and Ari Ganjar Herdiansah. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam

- Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019.” *Politea : Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (2020): 251–72.
- Purnomo, Agus. “Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pariwisata Di Kabupaten Karanganyar (Studi Analisis Deskriptif Kualitatif Pada Akun Instagram @Explorekankaranganyar)” 2, no. 2 (2018): 35–43.
- Santoso, Rudi. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 02 (2019): 2–9.
- Sari, Luthfia, and Al Rafni. “Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Pemilih.” *Journal of Civic Education* 3, no. 1 (2020): 119–26.
- Sirajuddin, Saleh, S. Pd., M. Pd. *Analisis Data Kualitatif. Analisis Data Kualitatif*. Pertama. Pustaka Ramadhab, Bandung, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.
- Suryanef, Al rafni. “Pkm Pengembangan Layanan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Pada Kpu Kota Bukittinggi.” *Jurnal JP-Ipteks*, no. 3 (2019): 23–29.
- Sutriani, Elma, and Rika Octaviani. “Keabsahan Data (Kualitatif).” *INA-Rxiv*, 2019, 1–22.
- Syahfitri, Maharani, and Rafni. “Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula (Studi Di KPU Kota Padang).” *Journal of Civic Education* Vol.4, no. 4 (2021): 2021. <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/576>.
- Tiowinanda, and nora eka putro. “Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Padang Dalam Pilkada Kota Padang” 2 (2019): 1–8.
- Zega, Milan Alfianni, Indra Muda, Beby Masitho Batubara, and Agung Suharyanto. “Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.” *Perspektif* 7, no. 2 (2019): 60.
- Zellatifanny, Cut Medika, and Bambang Mudjiyanto. “Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi.” *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.